



PETA PROSES BISNIS

INSTANSI PEMERINTAH

Andy Kurniawan

Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Kinerja

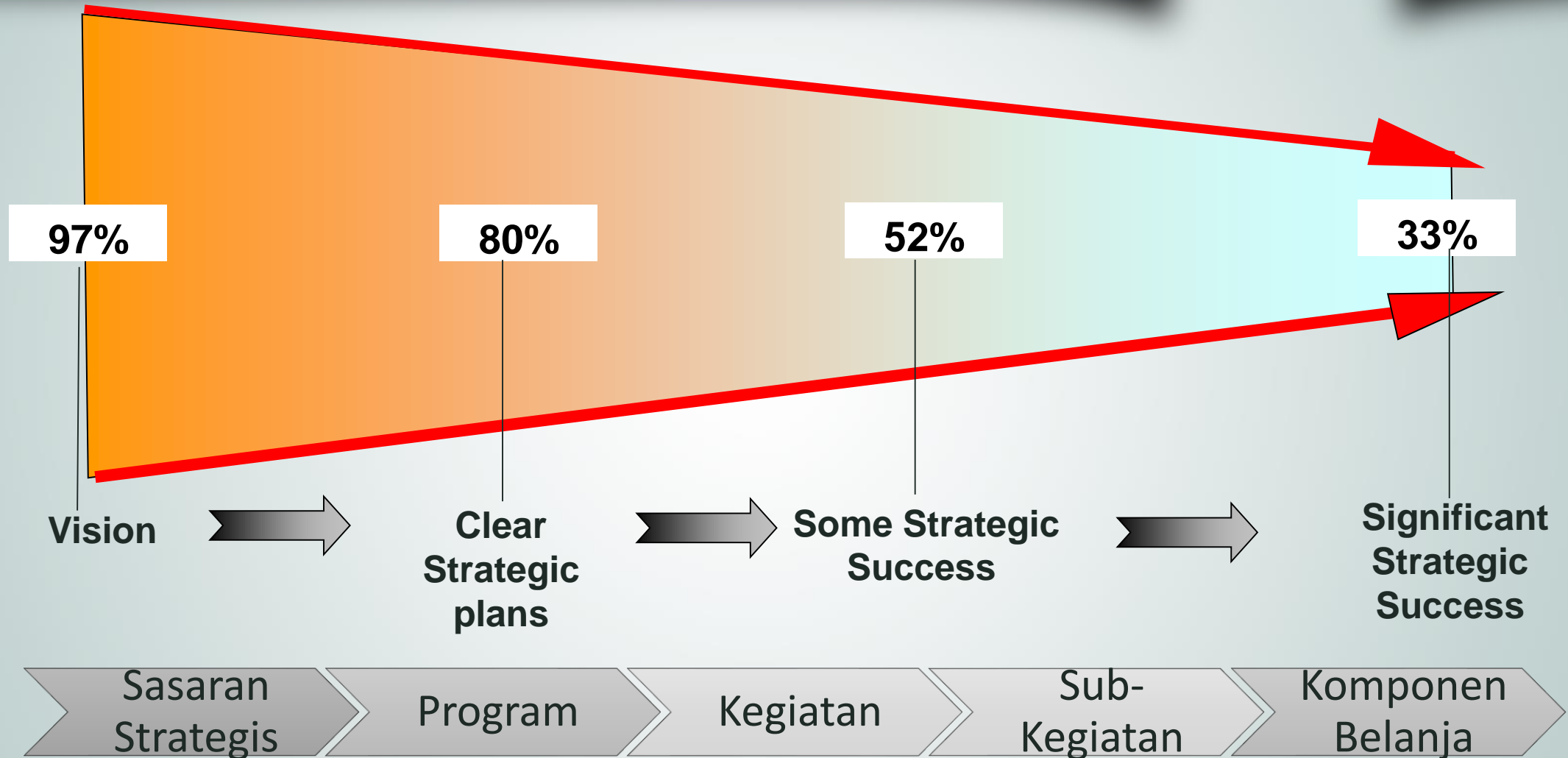


Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir, perilaku belanja dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran.

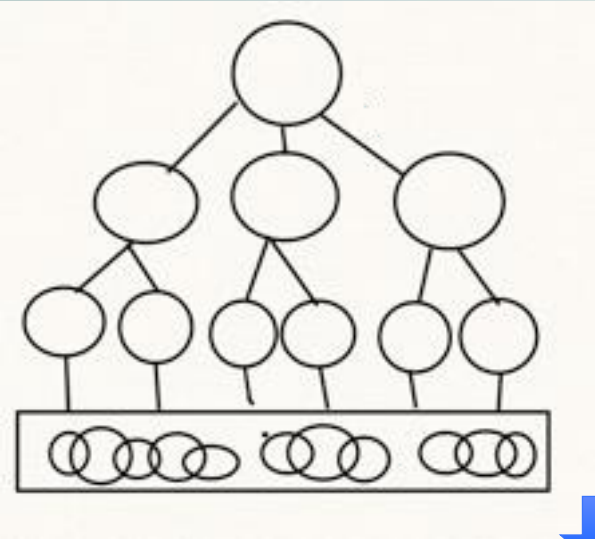
TRANSLATING VISION TO ACTION

Perencanaan hingga Penganggaran

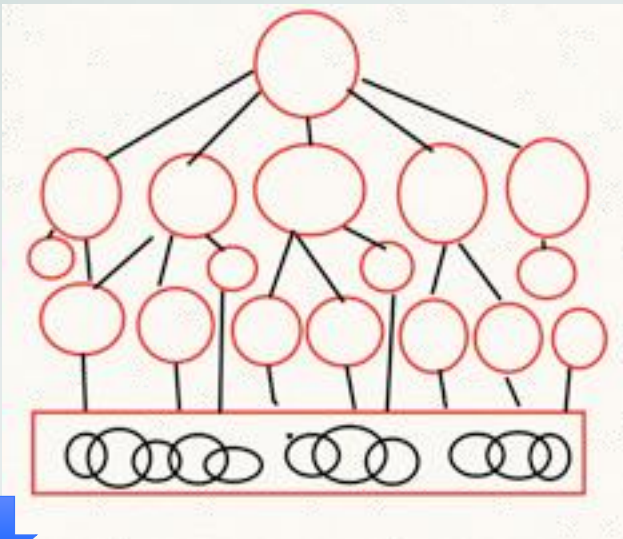
SLIDE 3



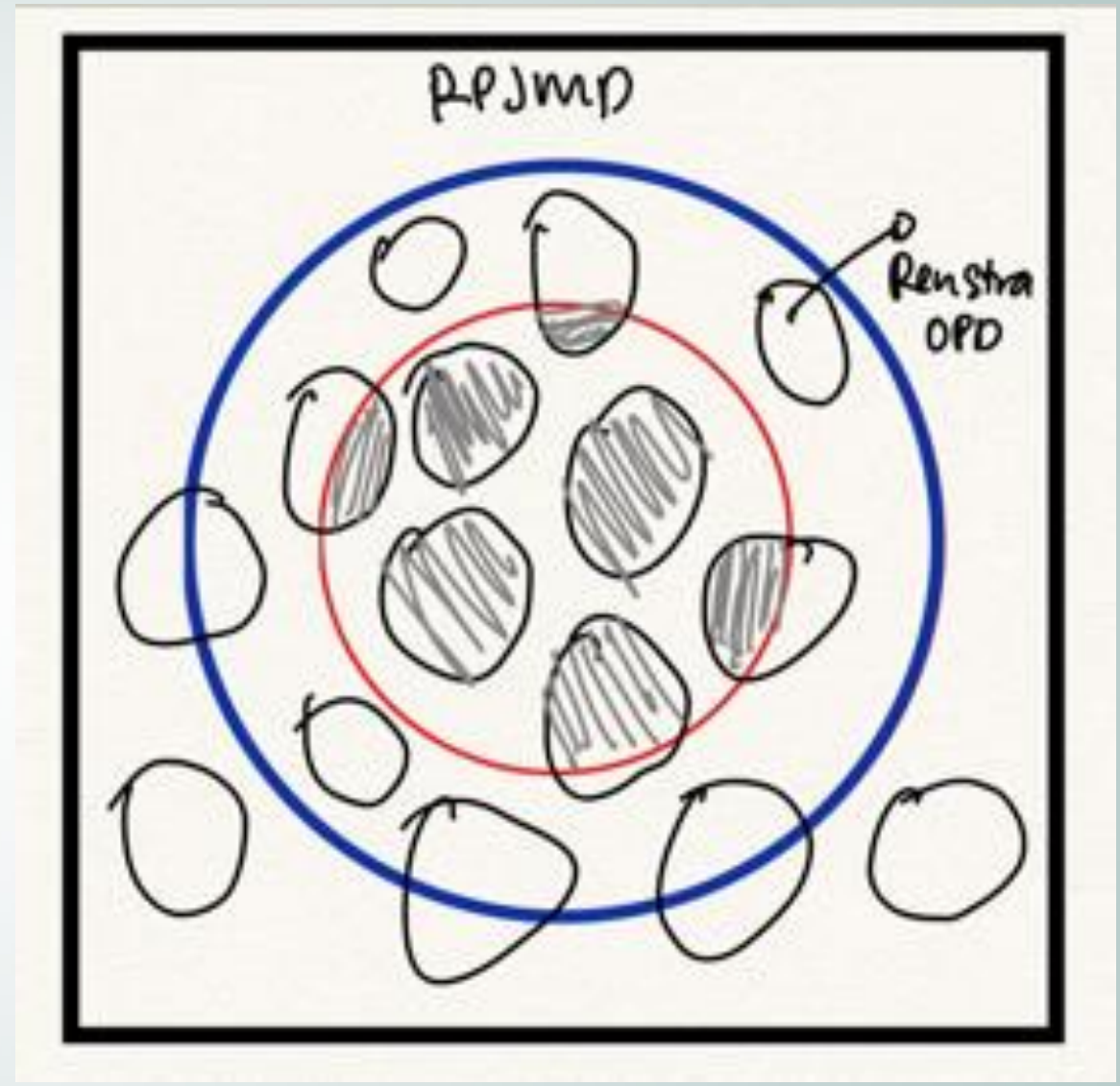
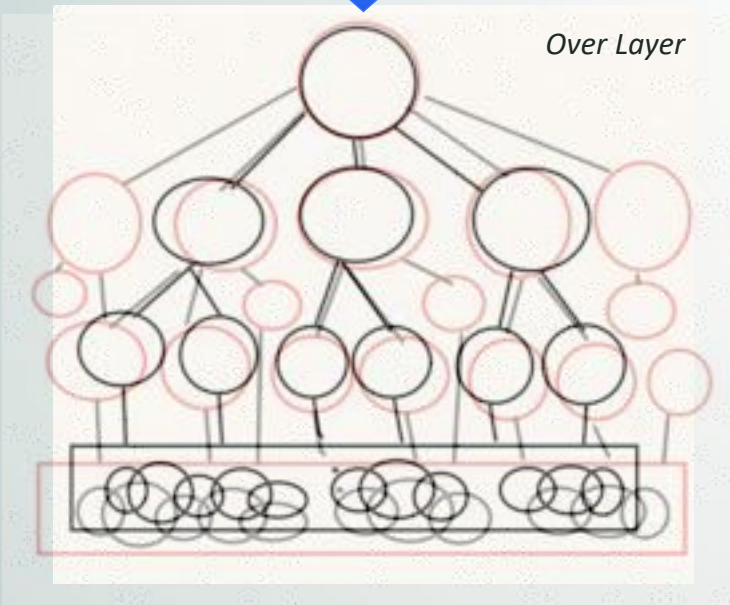
Model Peta Strategis
Perencanaan Pembangunan



Model Peta Strategis
Kelembagaan Perangkat Daerah



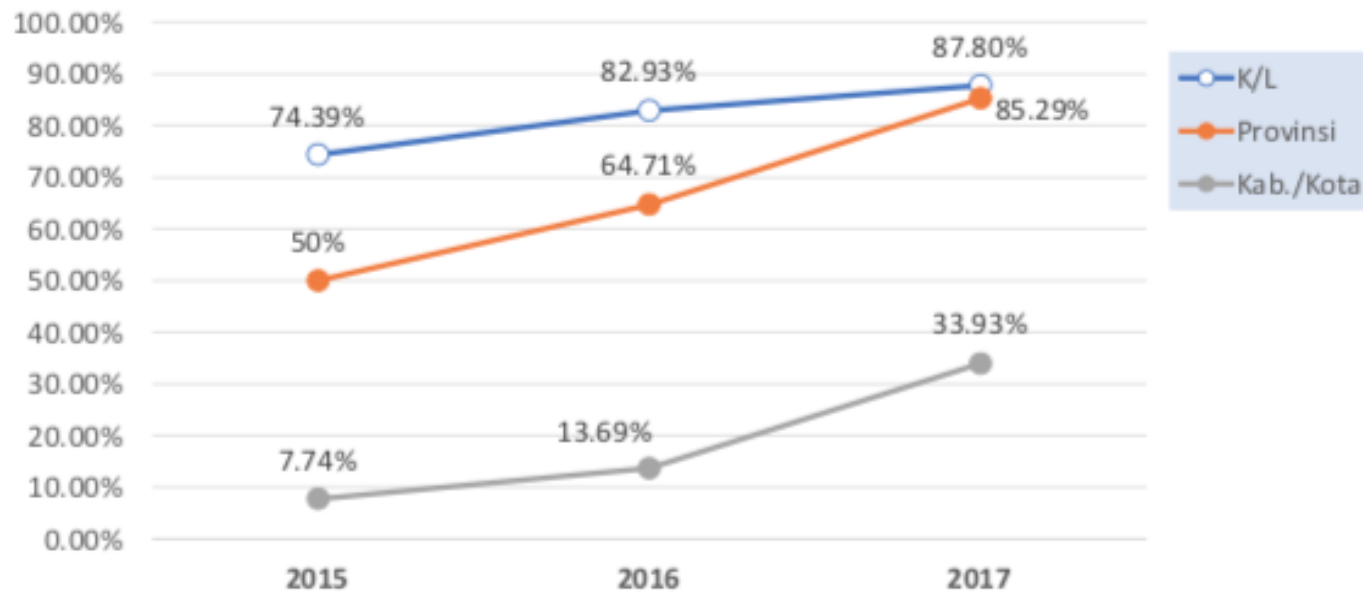
Over Layer



Dampak Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA)

Trend **Akuntabilitas Kinerja Baik**



Selama tahun 2017 ditemukan potensi efisiensi penggunaan anggaran sebesar:

Nilai efisiensi 2017

± 41,15 T

Sumber: Menpanrb, 2018

KATEGORI		Kementerian/ Lembaga			Pemerintah Provinsi			Kabupaten / Kota		
Kategori	Range Nilai	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AA	90-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	80-90	4	4	6	2	3	4	1	2	2
BB	70-80	21	27	26	7	7	6	7	10	30
B	60-70	36	37	40	8	12	19	31	57	139
CC	50-60	16	11	7	13	10	5	172	199	174
C	30-50	0	3	3	3	2	0	239	193	135
D	0-30	0	0	0	1	0	0	14	14	3

EFISIENSI DISEBABKAN OLEH:

1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Refocusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
3. Upaya *cross cutting* program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar instansi.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota di Jatim tahun 2017

	KABUPATEN KOTA	NILAI	PREDIKAT
1.	Kab. Banyuwangi	81.31	A
2.	Kab. Pasuruan	74.03	BB
3.	Kab. Sidoarjo	71.69	BB
4.	Kab. Gresik	71.67	BB
5.	Kab. Lamongan	70.96	BB
6.	Kota Malang	70.96	BB
7.	Kab. Tulungagung	70.94	BB
8.	Kota Blitar	70.86	BB
9.	Kab. Malang	70.51	BB
10.	Kab. Bondowoso	70.47	BB
11.	Kab. Probolinggo	70.04	BB
12.	Kab. Ngawi	70.04	BB
13.	Kota Surabaya	68.86	B
14.	Kab. Pamekasan	68.40	B
15.	Kab. Pacitan	64.05	B
16.	Kota Madiun	63.50	B
17.	Kab. Blitar	62.86	B
18.	Kab. Ponorogo	62.73	B
19.	Kota Pasuruan	62.28	B

	KABUPATEN KOTA	NILAI	PREDIKAT
20.	Kab. Situbondo	61.96	B
21.	Kab. Magetan	61.94	B
22.	Kab. Jombang	61.65	B
23.	Kab. Bojonegoro	61.50	B
24.	Kab. Kediri	61.41	B
25.	Kab. Tuban	61.29	B
26.	Kab. Mojokerto	61.23	B
27.	Kota Mojokerto	60.97	B
28.	Kota Kediri	60.90	B
29.	Kab. Madiun	60.82	B
30.	Kab. Lumajang	60.55	B
31.	Kab. Sumenep	60.15	B
32.	Kota Probolinggo	60.14	B
33.	Kab. Trenggalek	60.02	B
34.	Kab. Nganjuk	58.43	CC
35.	Kab. Jember	58.12	CC
36.	Kab. Bangkalan	56.06	CC
37.	Kab. Sampang	55.83	CC
38.	Kota Batu	42.02	C

HASIL EVALUASI SAKIP KAB. JOMBANG 2018

	Komponen Yang Dinilai	2017		2018	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	22.30	30	22,82
b.	Pengukuran Kinerja	25	14.60	25	16,49
c.	Pelaporan Kinerja	15	9.36	15	11,21
d.	Evaluasi Internal	10	2.60	10	6,15
e.	Capaian Kinerja	20	12.79	20	11,12
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61.65	100	67,79
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		B

UPAYA PERBAIKAN SAKIP YANG BISA DI MAKSIMALKAN



KOMPONEN DAN SUB-KOMPONEN PENILAIAN SAKIP →

Metode → 'PRAGMATIS'

Teknik evaluasi tergantung pada:

1. Tingkatan (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi. *Policy and Program*.
2. Validitas dan ketersediaan data yang dapat dievaluasi.

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

PRASYARAT DASAR NILAI SAKIP

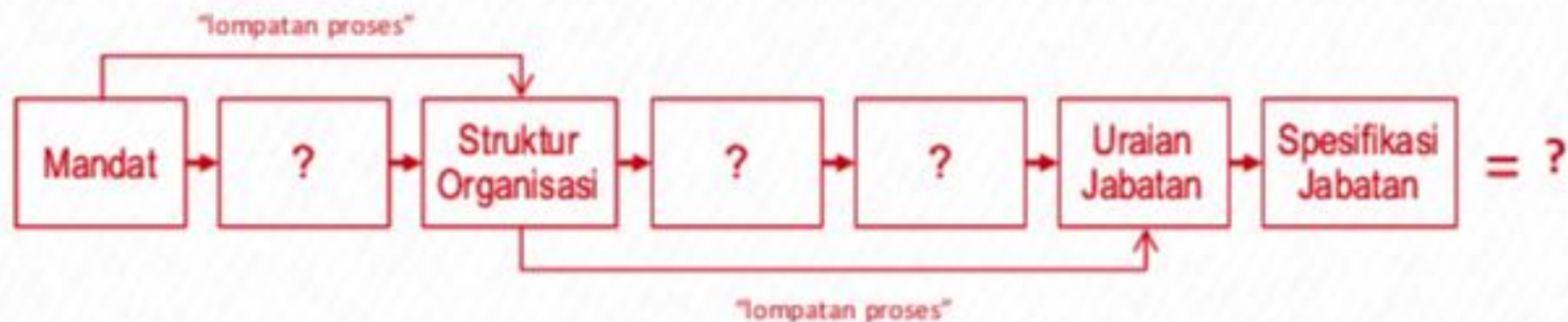
	ORGANISASI		UNIT KERJA ES 1/2		PK ES 3/4		PK INDIVIDU		RENCANA AKSI	EVALUASI INTERNAL		MANEJEMN KINERJA INDIVIDU		EFISIENSI	PENAJAMAN PROGRAM	RESTRUKTUSISASI ORGANISASI	APLIKASI	MANAJEMEN KINERJA
	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y		ADA	Y	ADA	Y					
AA	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	3/3 UNIT	ADA	Y	ADA	Y	MELALUI POHON KINERJA	REFOCUSING PROGRAM	RESTRUKTUSISASI ORGANISASI	ADA, INTEGRASI	ADA, IMPLEMENTASI
	KWAL	Y	KWAL	Y	KWAL	Y	KWAL	Y		KWAL	Y	KWAL	Y					
	CASCADING		3/3 UNIT		3/3 UNIT		3/3 UNIT			KWAL	Y	INDIVIDU						
A	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	3/3 UNIT	ADA	Y	ADA	Y	MELALUI POHON KINERJA	REFOCUSING PROGRAM	X	ADA, INTEGRASI	ADA, IMPLEMENTASI
	KWAL	Y	KWAL	Y	KWAL	Y	KWAL	T		KWAL	Y	KWAL	Y					
	CASCADING		3/3 UNIT + CASCADING		3/3 UNIT + CASCADING		3/3 UNIT			KWAL	Y	ES IV						
BB	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	2/3 UNIT	ADA	Y	ADA	Y	MELALUI POHON KINERJA	REFOCUSING PROGRAM	X	ADA	ADA, KUALITAS
	KWAL	Y	KWAL	Y	KWAL	Y	KWAL	T		KWAL	Y	KWAL	Y					
	CASCADING		2/3 UNIT + CASCADING		2/3 UNIT + CASCADING		2/3 UNIT			KWAL	Y	ES III						
B	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	1/3 UNIT	ADA	Y	ADA	Y	TIDAK MELALUI POHON KINERJA	X	X	X	X
	KWAL	Y	KWAL	Y	KWAL	T	KWAL	T		KWAL	T	KWAL	T					
			1/3 UNIT		1/3 UNIT		1/3 UNIT			KWAL	T							
CC	ADA	Y	ADA	Y	X		X		X	X		X		X	X	X	X	X
	KWAL	Y	KWAL	T														
C	ADA	Y	ADA	Y	X		X		X	X		X		X	X	X	X	X
	KWAL	T	KWAL	T														
D	ADA	Y	ADA	T	X		X		X	X		X		X	X	X	X	X
	KWAL	T	KWAL	T														

Praktek Terbaik



Kesenjangan

Kondisi Saat Ini



1. Adanya "lompatan proses" pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan bisnis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang "seragam";
3. Uraian jabatan yang "seragam" akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja

Definition: Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial

Tematik-Holistik

dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan **unsur/bagian/kegiatan** pembangunan sebagai satu **kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan** dan/atau permasalahan yang **saling berkaitan** satu dengan lainnya.

Money follow Program

Alokasi anggaran pembangunan diorientasikan pada pencapaian program prioritas, bukan pada tugas dan fungsi



Perencanaan
Pembangunan
yang berorientasi
pada Substansi



Integratif

dilaksanakan dengan **menyatukan beberapa kewenangan** kedalam satu proses **terpadu dan fokus** yang jelas dalam upaya **pencapaian tujuan** pembangunan Daerah

Spasial

dilaksanakan dengan mempertimbangkan **dimensi keruangan** dalam perencanaan

Tematik: Penekanan atau fokus perencanaan. Sampai dengan Program Prioritas

Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu → hilir)

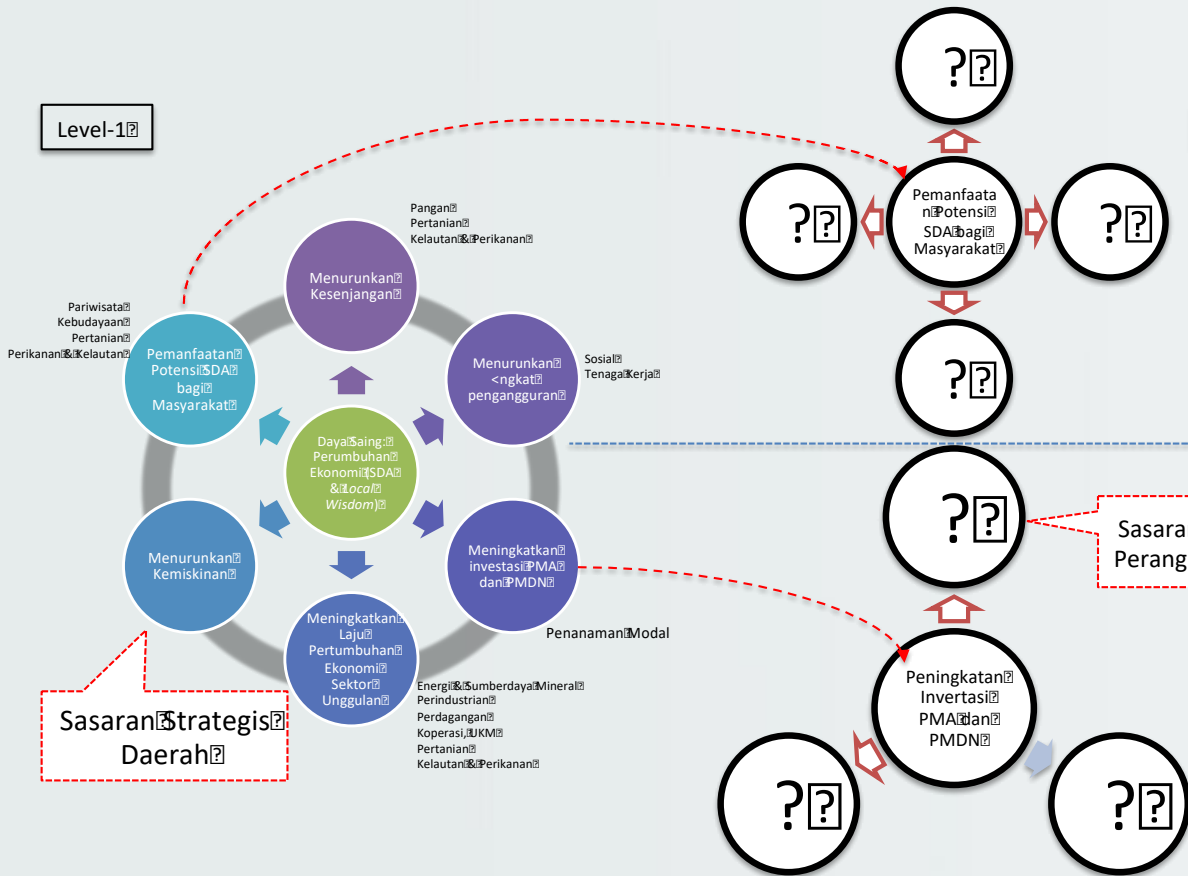
Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan

Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi



Metode Penyusunan

Perencanaan Kinerja Pembangunan

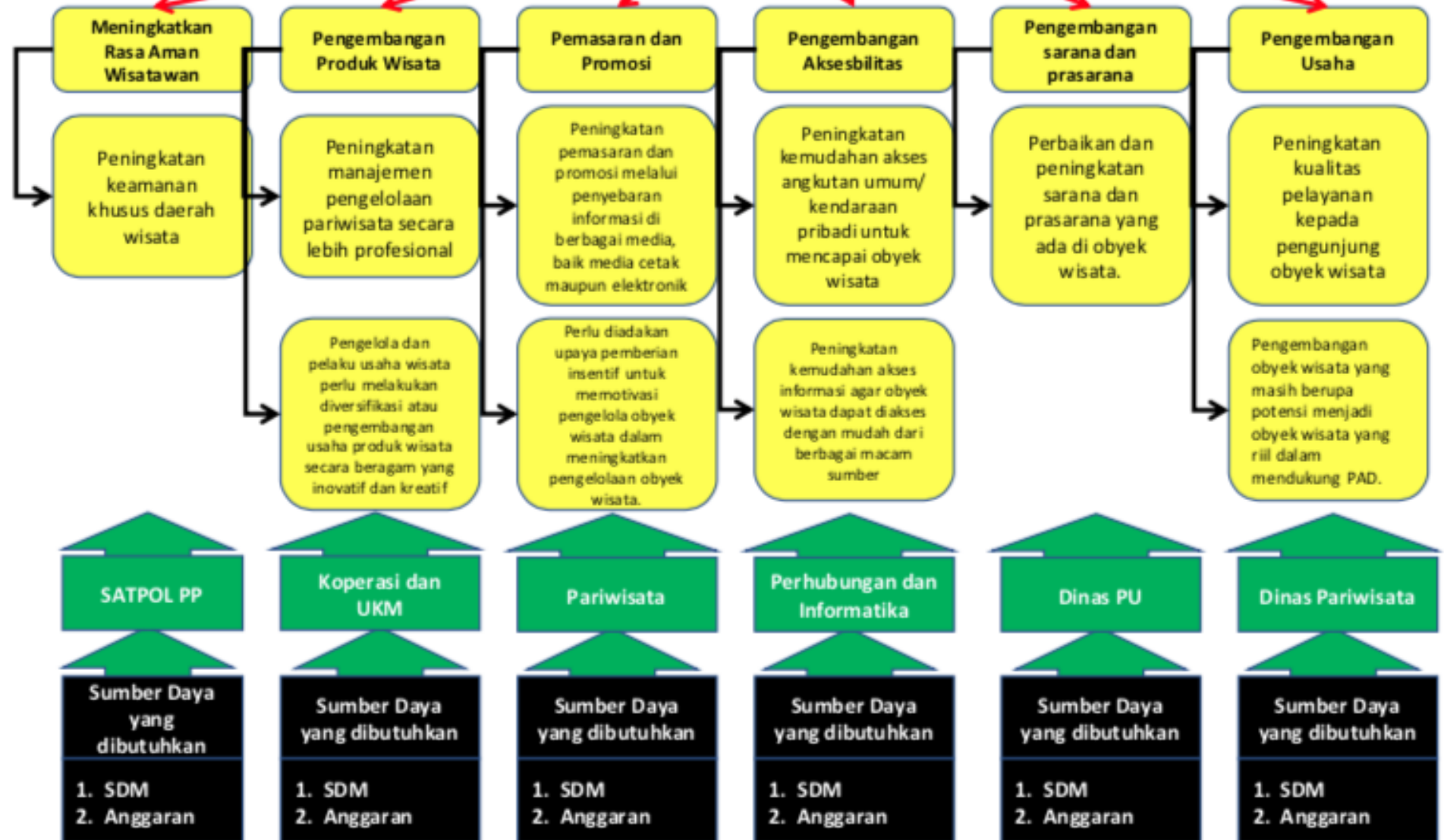


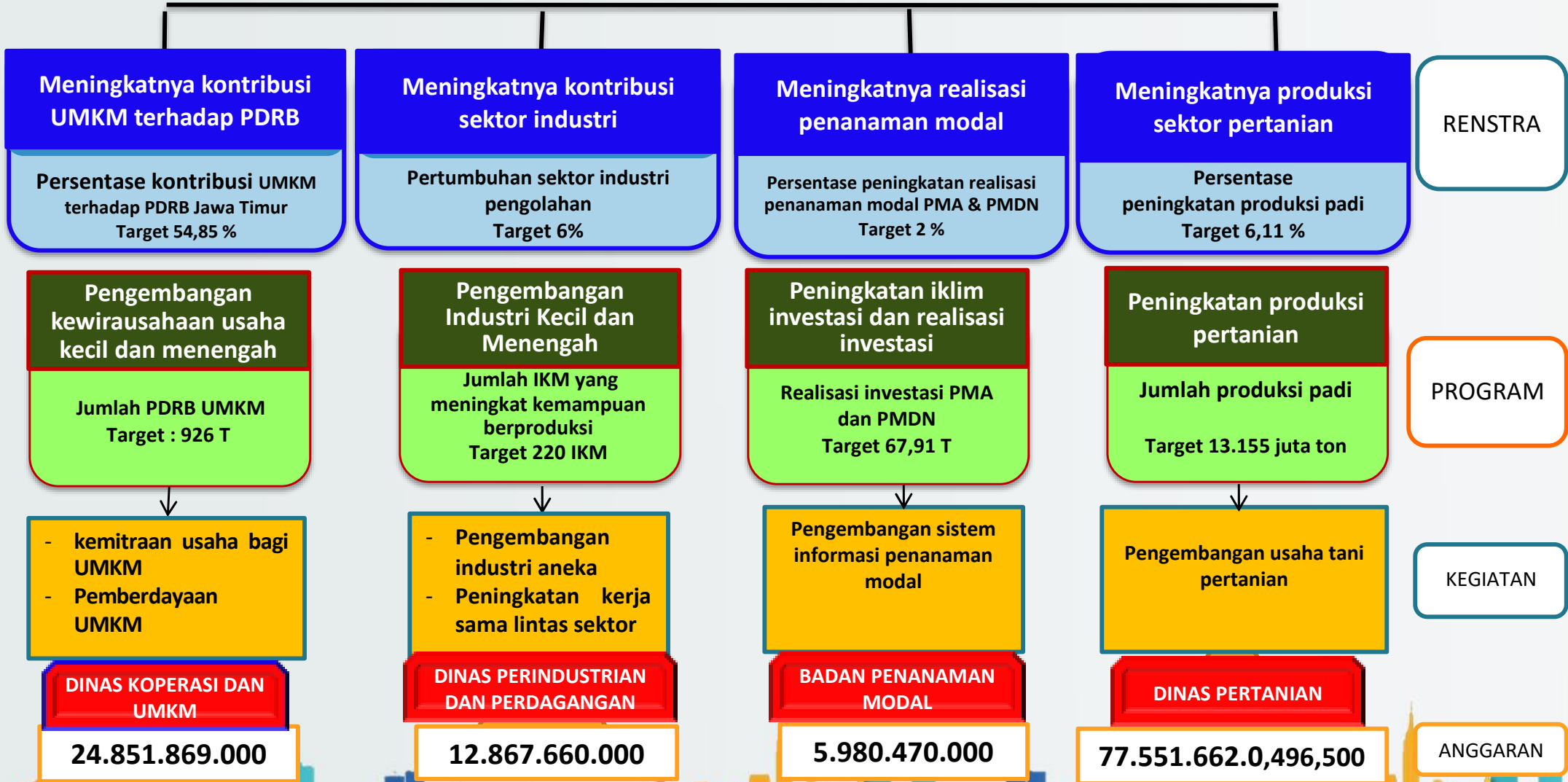
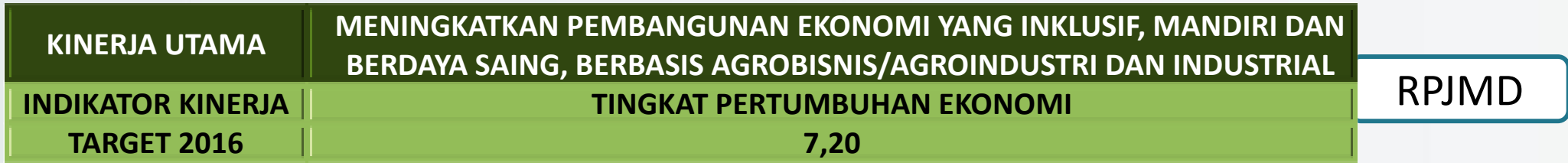
1. Cascading dibangun dalam kerangka penyelarasan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahunan;
2. Cascading dilengkapi dengan formula perhitungan untuk mendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan;
3. Sasaran IKU (Pemda), Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan masuk dalam aplikasi e-planning yang terintegrasi.



CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI

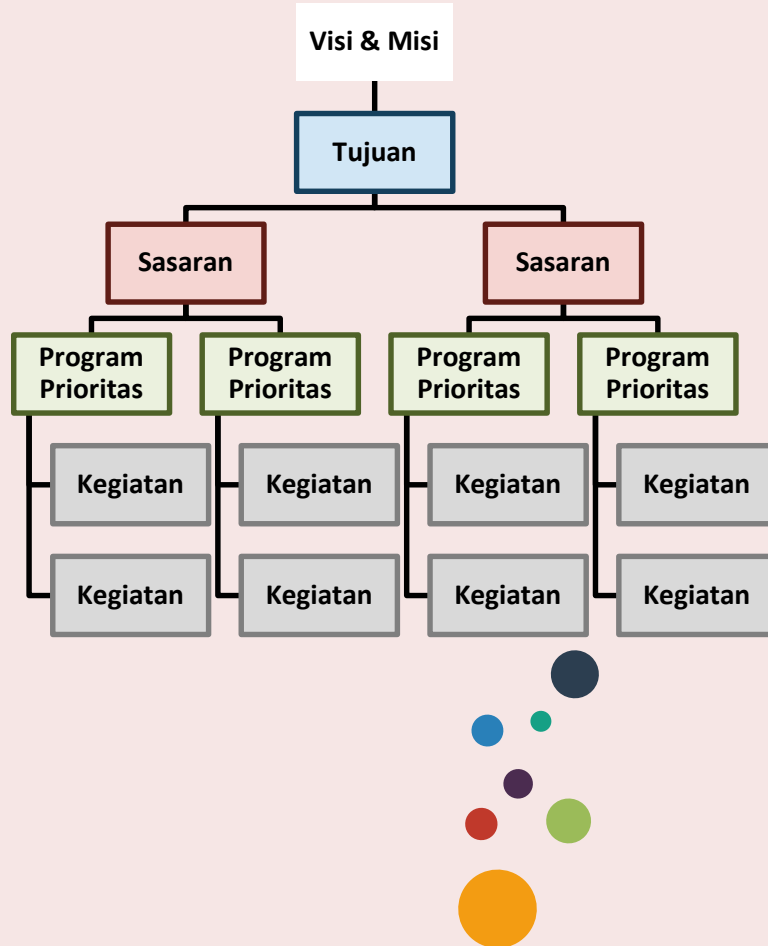
Meningkatkan Industri Pariwisata



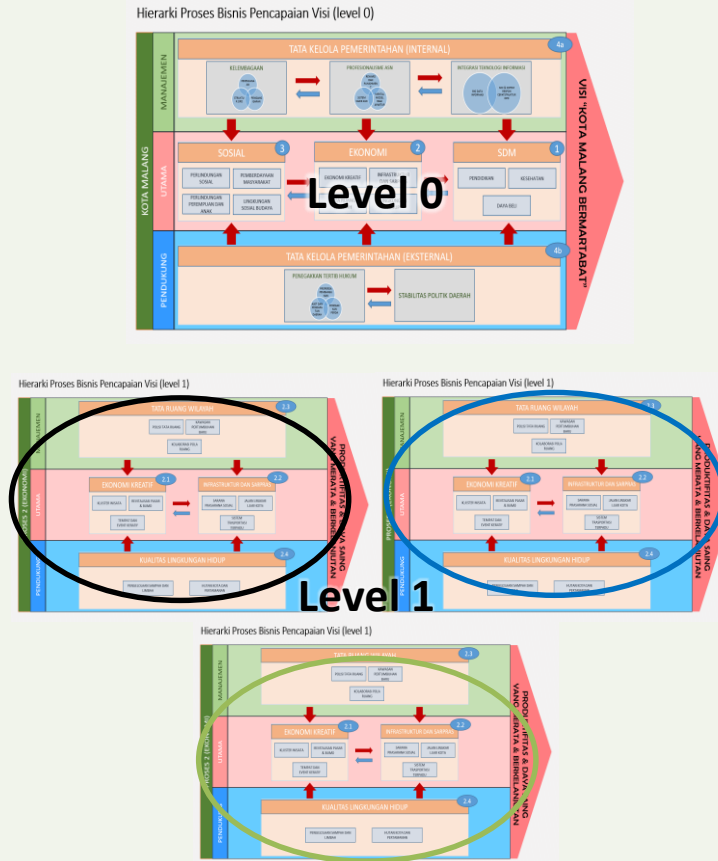


Relasi Integrasi antar Perencanaan dengan Desain Kelembagaan

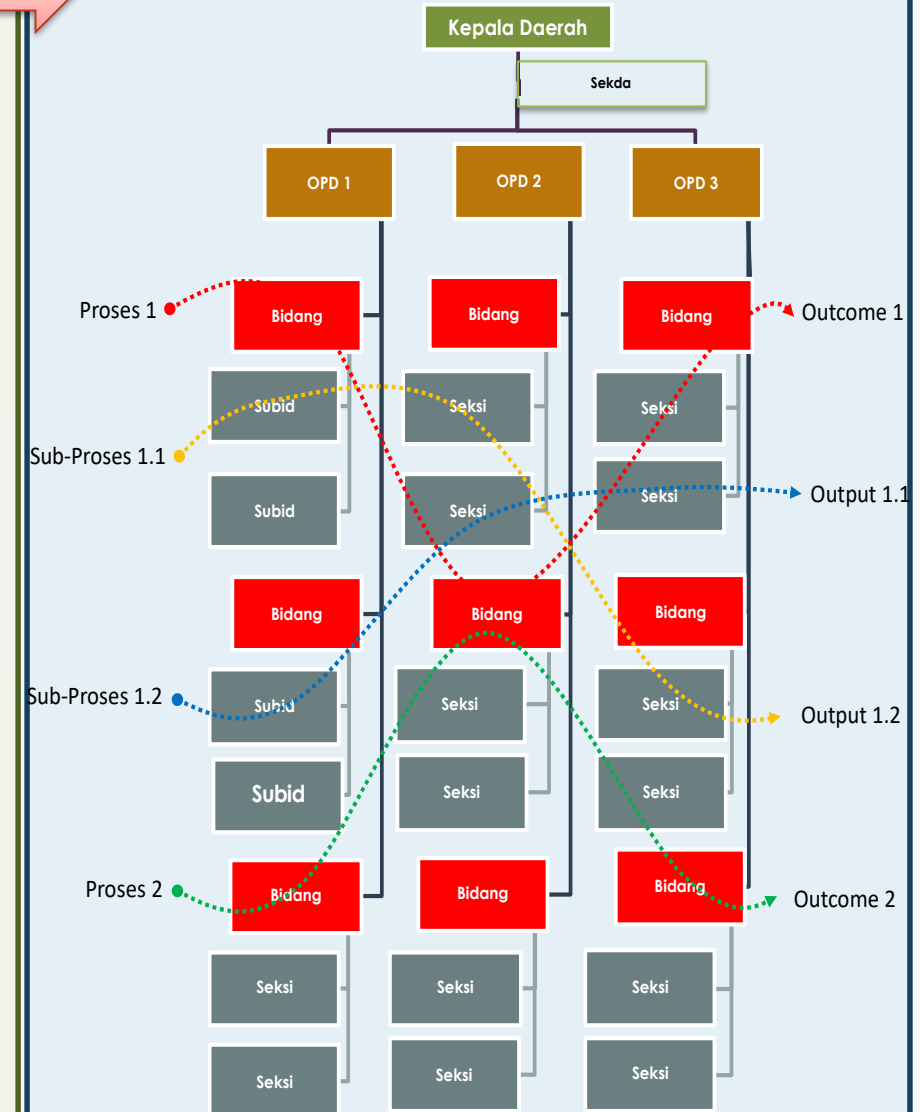
Logframe Kinerja



Peta Proses Bisnis



Desain Organisasi



KONSEP DASAR PROSES BISNIS

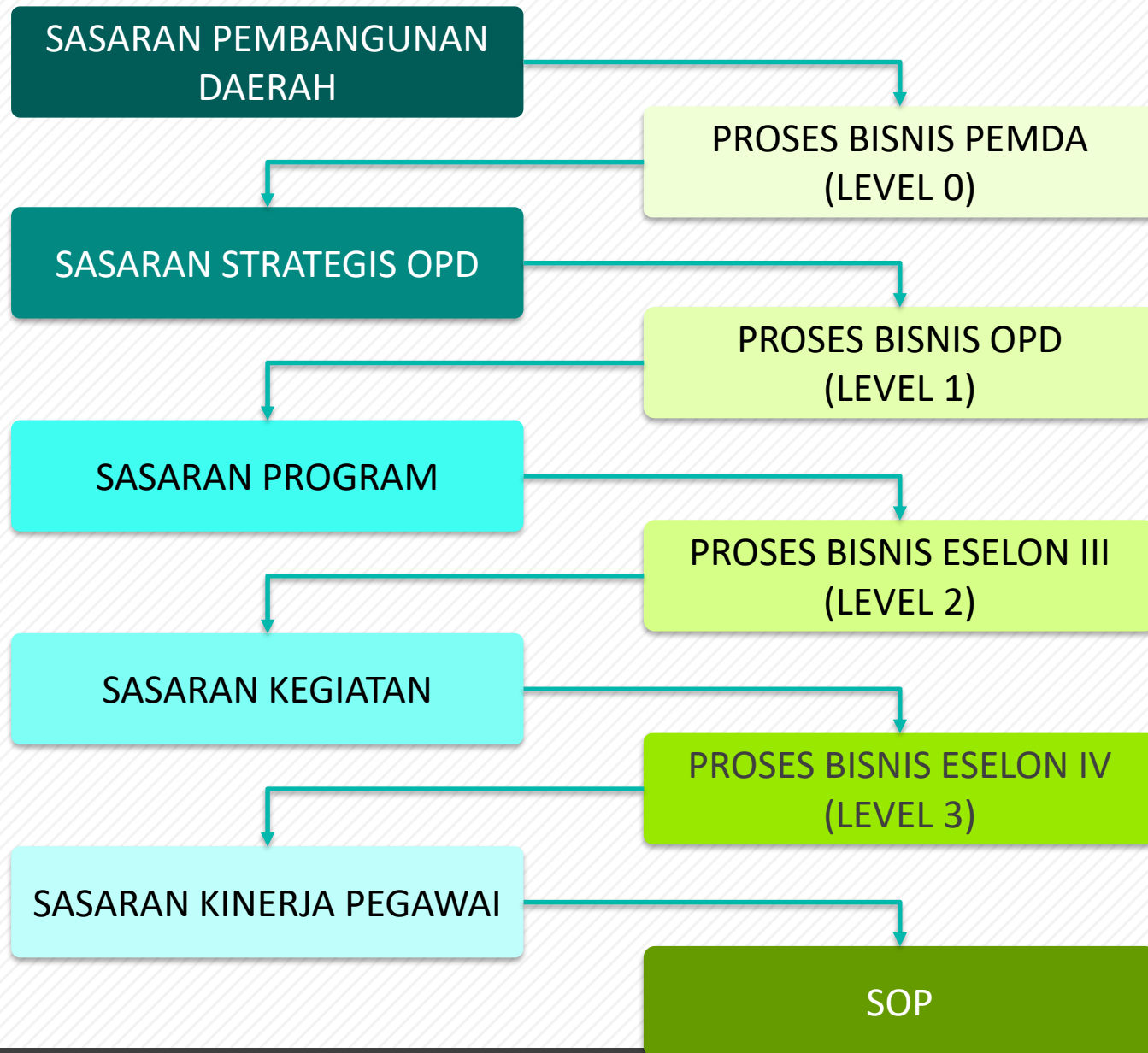
Pengertian, Ruang Lingkup dan Relasi

STRATEGI IMPLEMENTASI

Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi



CASCADE KINERJA BERDASARKAN PROSES BISNIS



PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MERUPAKAN ACUAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENGGAMBARKAN **HUBUNGAN KERJA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN** ANTAR UNIT ORGANISASI UNTUK **MENGHASILKAN KINERJA SESUAI DENGAN TUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI** AGAR MENGHASILKAN KELUARAN YANG BERNILAI TAMBAH BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN.

Definisi, Maksud Dan Tujuan

PROSES BISNIS

sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang tersedia.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

aktivitas kerja yang digambarkan secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis, rutin atau berulang-ulang

Maksud dan Tujuan

Agar setiap instansi pemerintah:

1

mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien

2

mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal

3

memiliki aset pengetahuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis

4

mudah melihat potensi masalah dan potensi perbaikan

5

memiliki standar pelaksanaan pekerjaan

PRINSIP-PRINSIP

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah



Definitif

Jelas Batasan, Masukan dan keluaran



Urutan

Aktivitas berurutan sesuai waktu dan ruang



Pengguna Layanan

Berorientasi pada penerima hasil kinerja organisasi



Nilai Tambah

Transformasi dari proses memberikan nilai tambah bagi penerima



Keterkaitan

Tidak berdiri sendiri, saling terkait dalam satu struktur



Fungsi Silang

Proses mencakup hasil kerjasama beberapa fungsi



Sederhana-Represntatif

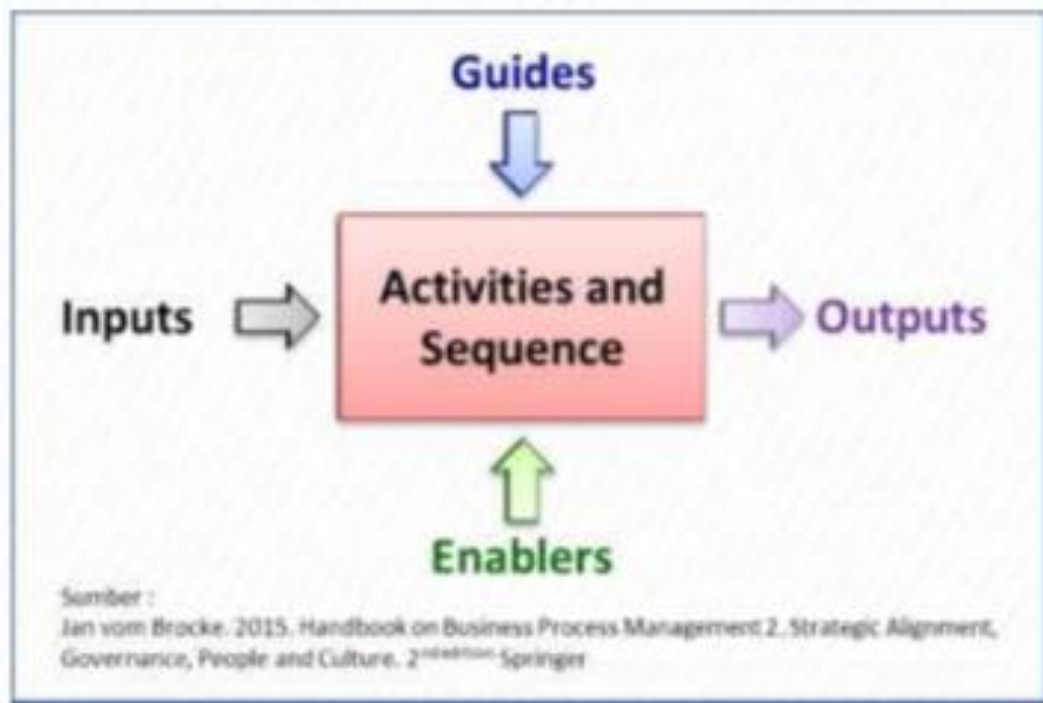
Mewakili seluruh aktivitas dan digambarkan secara simple



Konsensus-Subyektif

Disepakati Bersama seluruh unit organisasi

PETA PROSES BISNIS



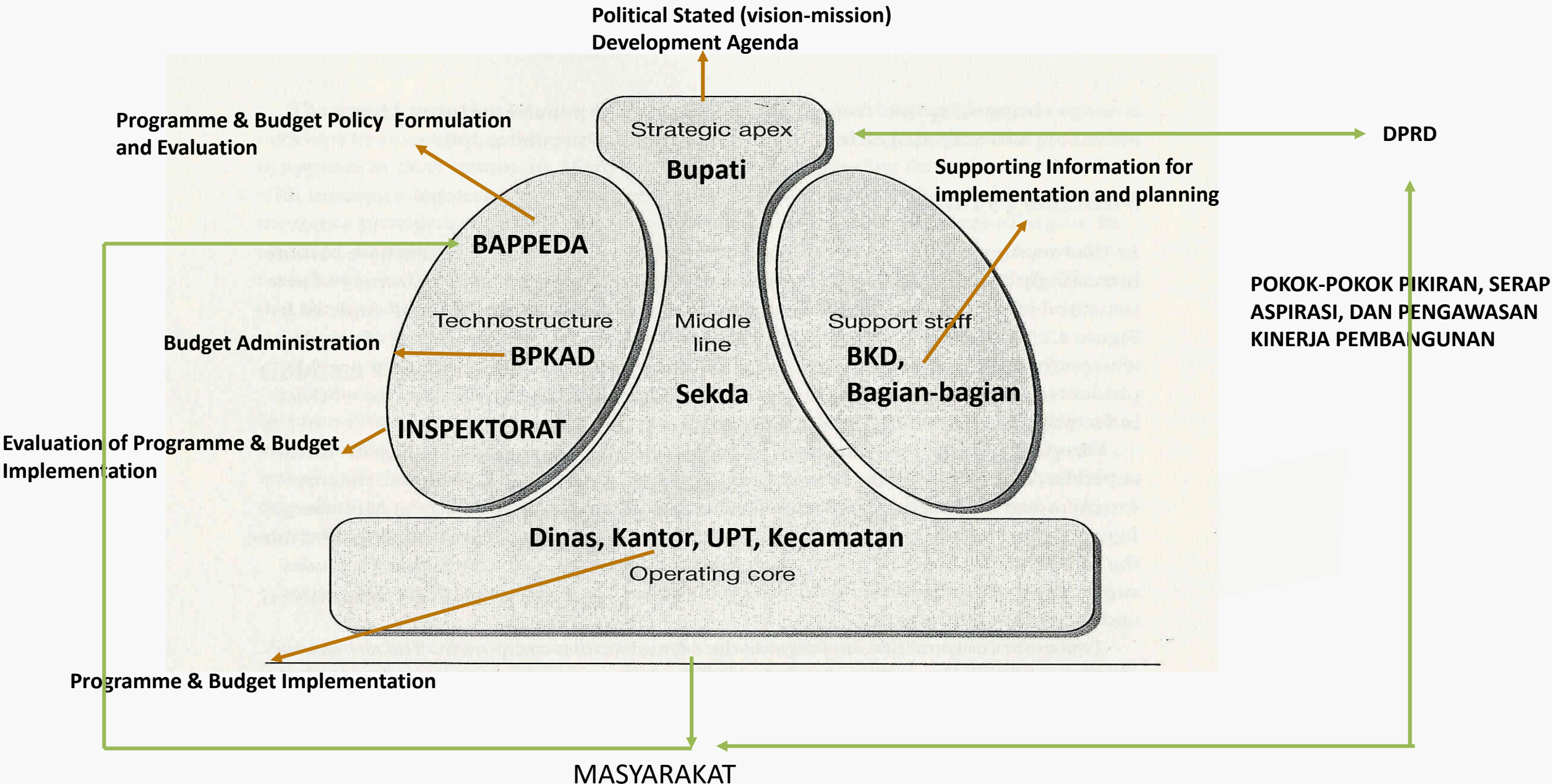
=



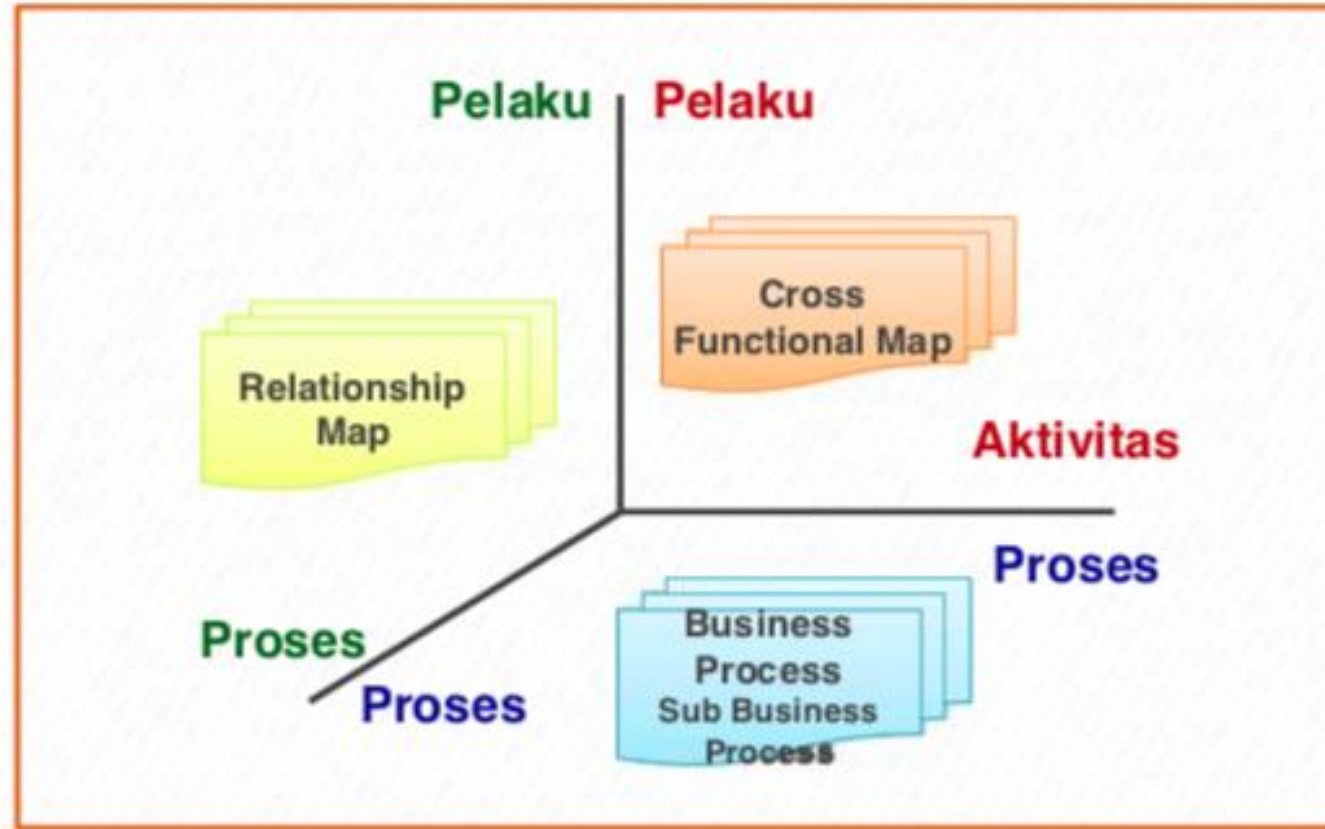
Dari berbagai referensi dapat diperoleh “kaidah dasar”, bahwa proses bisnis (sederhana) terbagi dalam 3 (tiga) bagian :

- **Management process = guides** >> menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan;
- **Main process = activities and sequence** >> pelaksanaan proses inti
- **Supporting process = enabler** >> merupakan prasyarat (pendukung) pelaksanaan proses inti;

Bisnis utama harus sesuai dengan tipologi kelembagaan



Peta Proses dan Tatalaksana



- **Business process atau Sub-business process** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Proses dengan Proses”;
- **Cross functional map** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Aktivitas”;
- **Relationship map** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Proses”;

PENDOKUMENTASIAN

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

1. PENDAHULUAN

- a) Latar Belakang
- b) Dasar Hukum
- c) Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi

2. PETA PROSES

- a) Gambar Peta Proses dengan SiPoC
- b) Gambar Peta Proses
- c) Penjelasan Peta Proses (Utama, Manajerial, Lain-lain)

3. PETA SUB-PROSES

- a) Gambar Peta Sub-Proses dengan SiPoC
- b) Gambar Peta Sub-Proses
- c) Penjelasan Peta Sub-Proses

4. PETA RELASI

- a) Gambar Peta Relasi
- b) Penjelasan Peta Relasi

5. PETA LINTAS FUNGSI

- a) Gambar Peta Lintas Fungsi
- b) Penjelasan Peta Lintas Fungsi

6. PENUTUP

- a) Kaidah Pelaksanaa dan Perubahan
- b) Kaidah Monitoring dan Evaluasi

BAGAIMANA MENEMUKAN BISNIS UTAMA ORGANISASI

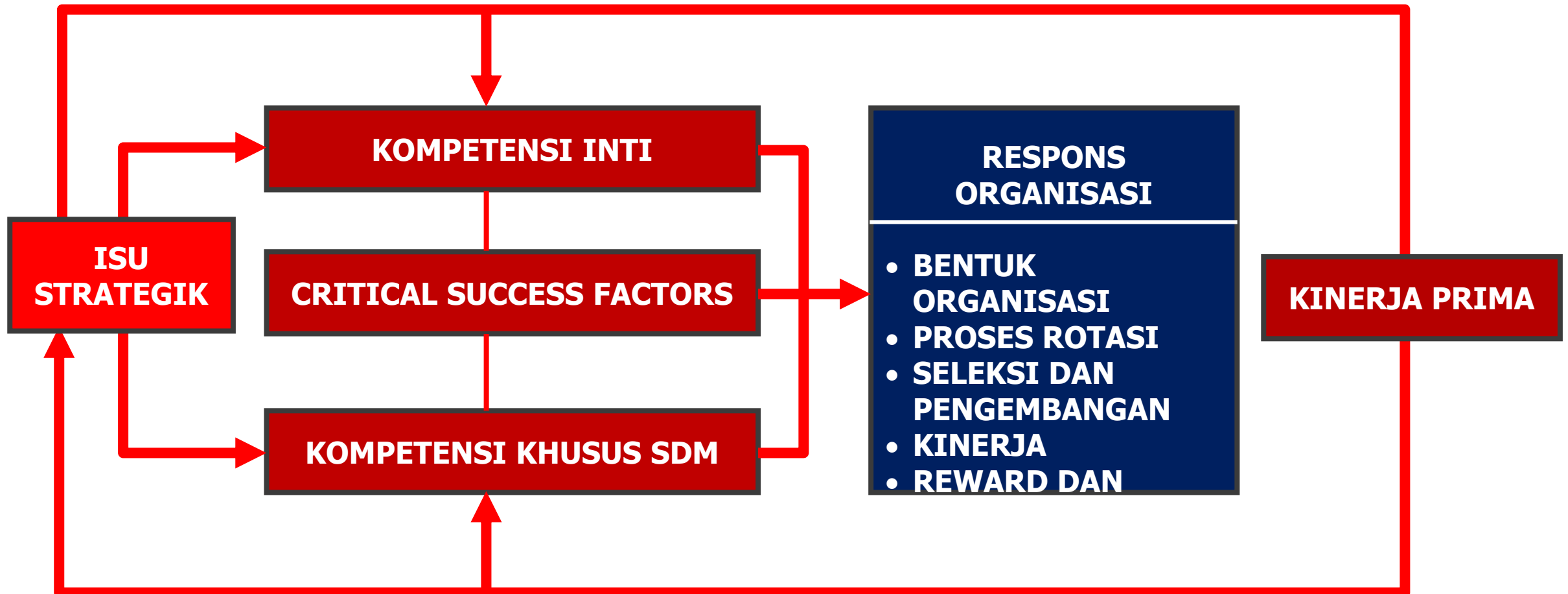
Pendekatan Mission Model Canvas dan Value Proposition

SYARAT DASAR PROSES BISNIS BISA DISUSUN

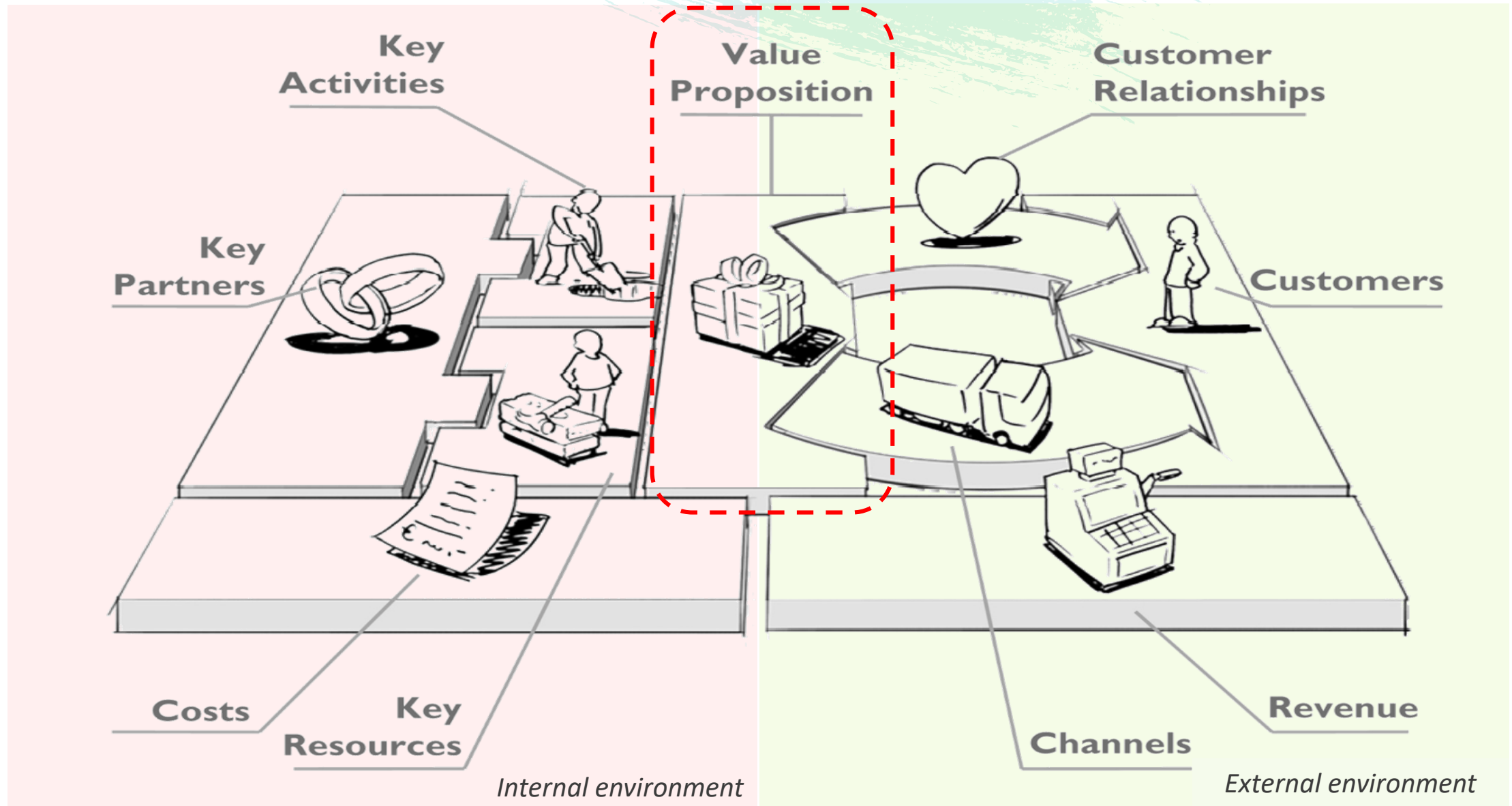
- Perencanaan Kinerja memiliki Logframe;
- Mengetahui Main Bisnis Unit Organisasi;
- Mengetahui *causal loop* pencapaian Kinerja;
- Tidak ada ego sektoral antar unit / sub-unit Organisasi;
- Dilakukan secara Partisipatif;

Membangun Desain Organisasi

PROSES ORGANISASI



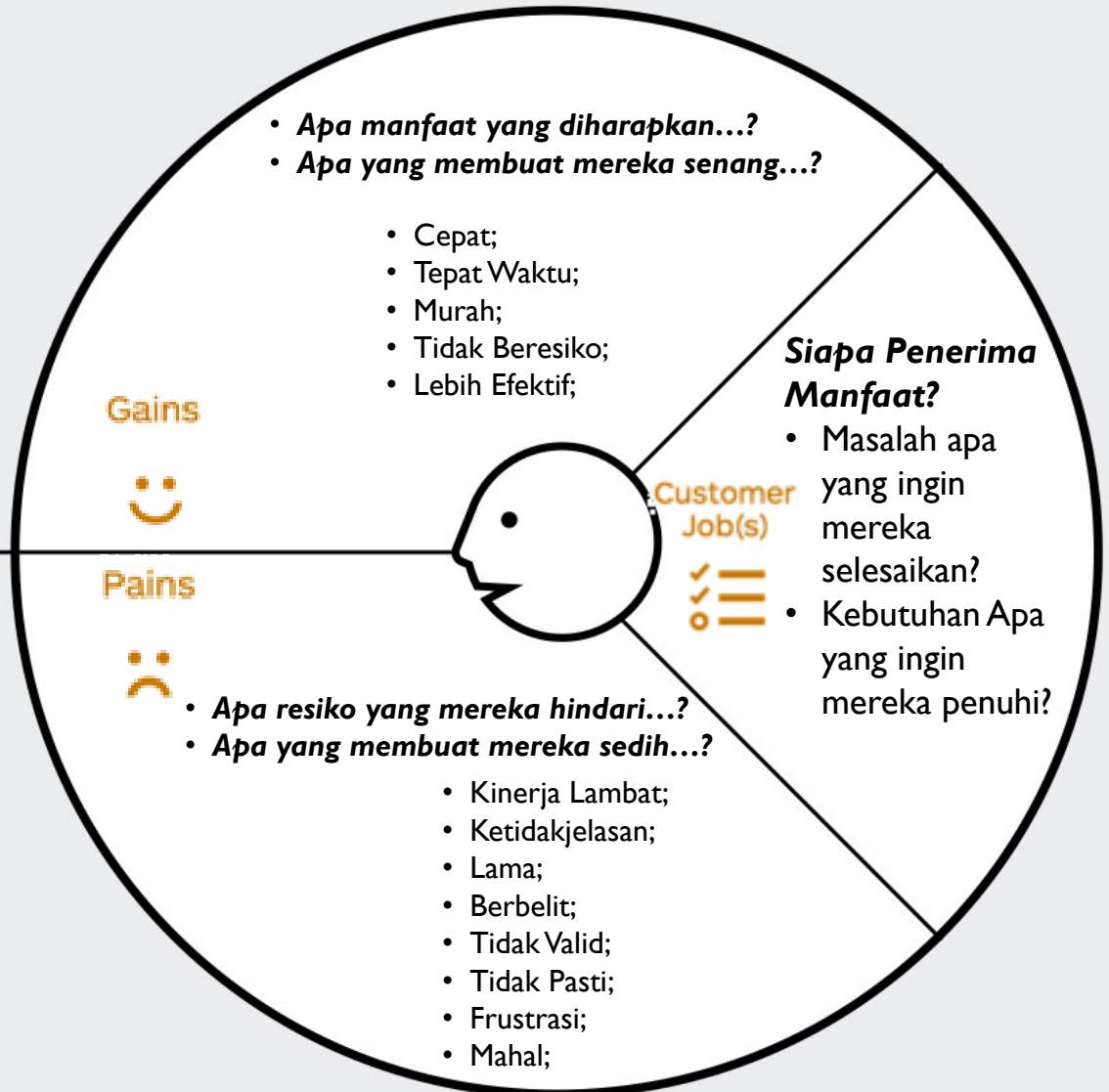
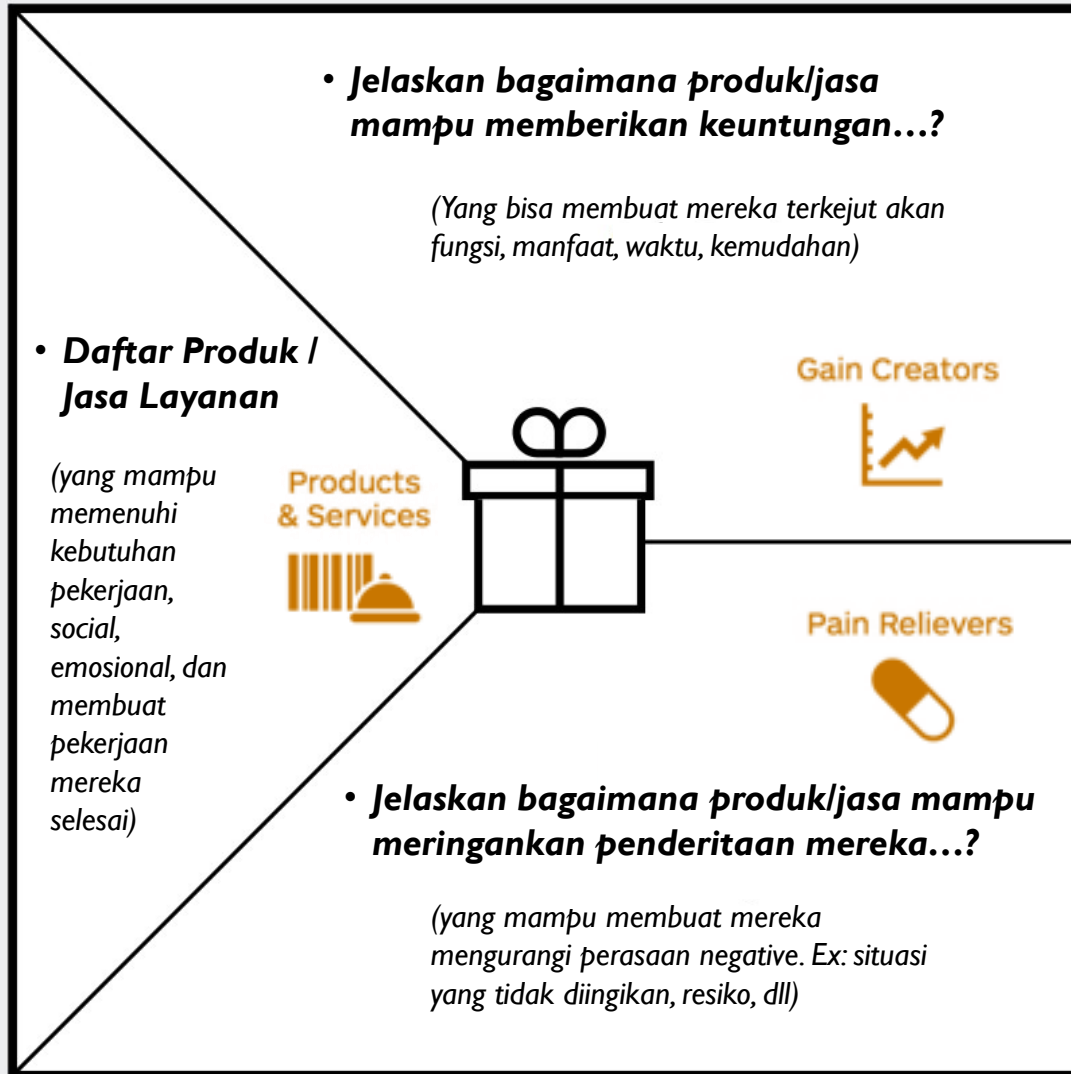
Mengidentifikasi Core Value Organisasi Melalui Model Canvas



The Value Proposition Canvas

Value Proposition

Customer Segment



Key Partners



Siapa mitra diluar organisasi anda yang dapat bekerjasama dalam rangka melakukan aktivitas utama..?

Key Activities



Apa Kegiatan Utama untuk bisa menghasilkan value preposition?

Value Propositions



Masalah apa yang ini diselesaikan dari penerima manfaat?

Untuk masing-masing penerima manfaat, Produk / Jasa terbaik yang bisa ditawarkan?

Buy-in & Support



Untuk setiap penerima manfaat, bagaimana cara kita mendapat dukungan?

Beneficiaries



Siapa (masing-masing) Penerima Manfaat...?

Key Resources



Untuk mengerjakan aktivitas utama, sumber apa yang dibutuhkan?

Deployment



Bagaimana / Melalui Apa mendistribusi produk / jasa..?

Mission Budget/Cost



Biayanya dari mana? Untuk bisa medelivery value preposition...?

Mission Achievement/Impact Factors



Apa ukuran yang membuktikan keberhasilan produk / jasa layanan yang telah diberikan?

Key Partners



Kementerian/
Lembaga

DPR/DPD

Unit Eselon I
Kementerian
Keuangan

BPK

BPKP

BI

APH

Pemerintahan
Daerah

Media
Masa

Universitas

Key Activities



Perumusan
Kebijakan dan
Perencanaan HKPD

Penganggaran dan Pengalokasian
Dana Transfer ke Daerah, Dana
Desa, dan Hibah Daerah

Peningkatan
Kapasitas
Keuangan
Daerah

Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Transfer ke
Daerah, Dana
Desa, dan Hibah
Daerah

Penyelenggaraan
SIKD

Monitoring dan
Evaluasi
Pengelolaan
HKPD

Key Resources

Informasi
dan Data

SOP

SDM

Aset/
Infrastruktur

Rencana
Strategis

Peraturan
Perundang-
undangan

Kode Etik

Anggaran



Value Propositions



Menjadi *one source data* untuk
keuangan daerah di
level nasional

Pembina jabatan
fungsional analis
keuangan pusat dan
daerah

Kewenangan sebagai
penyedia layanan
terpadu keuangan
daerah (RPTKD)

Menjadi model
monitoring dan evaluasi
hubungan keuangan
pusat dan daerah

Kewenangan
perumusan formulasi
kebijakan desentralisasi
fiskal

Kewenangan alokasi
dan pelaksanaan transfer
ke daerah dan dana
desa

Memegang teguh nilai-nilai
kementerian keuangan
(integritas, profesionalisme,
pelayanan, sinergi,
kesempumaan)

Customer Relationships



Offline: Sosialisasi,
Korespondensi,
Koordinasi, Supervisi,
Workshop, Bimbingan
Teknis, Ruang
Pelayanan Terpadu,
Kotak Saran, Site Visit

Online: Situs
djpk.depkeu.go.id, Call
Center, Help Desk.

Channels



Email

Media
Defis

SIKD

Website

Telepon

Social Media
(Facebook, Twitter)

Customer Segments



Kementerian/
Lembaga

Pemerintahan
Daerah

Masyarakat

Akademisi

Desa

Guru

Sekolah

Puskesmas

Cost Structure

Belanja
Pegawai

Belanja
Barang dan
Jasa

Belanja
Modal

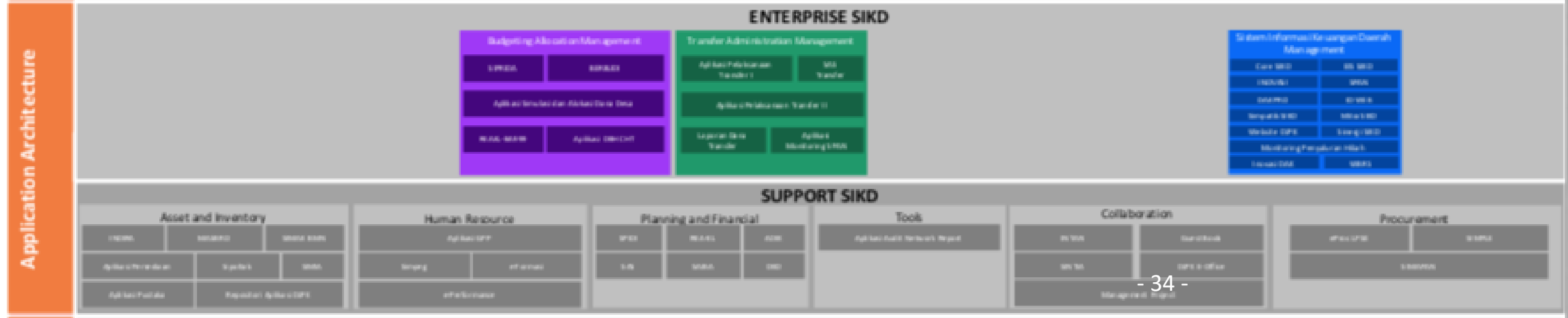


Revenue Streams

APBN

Donor



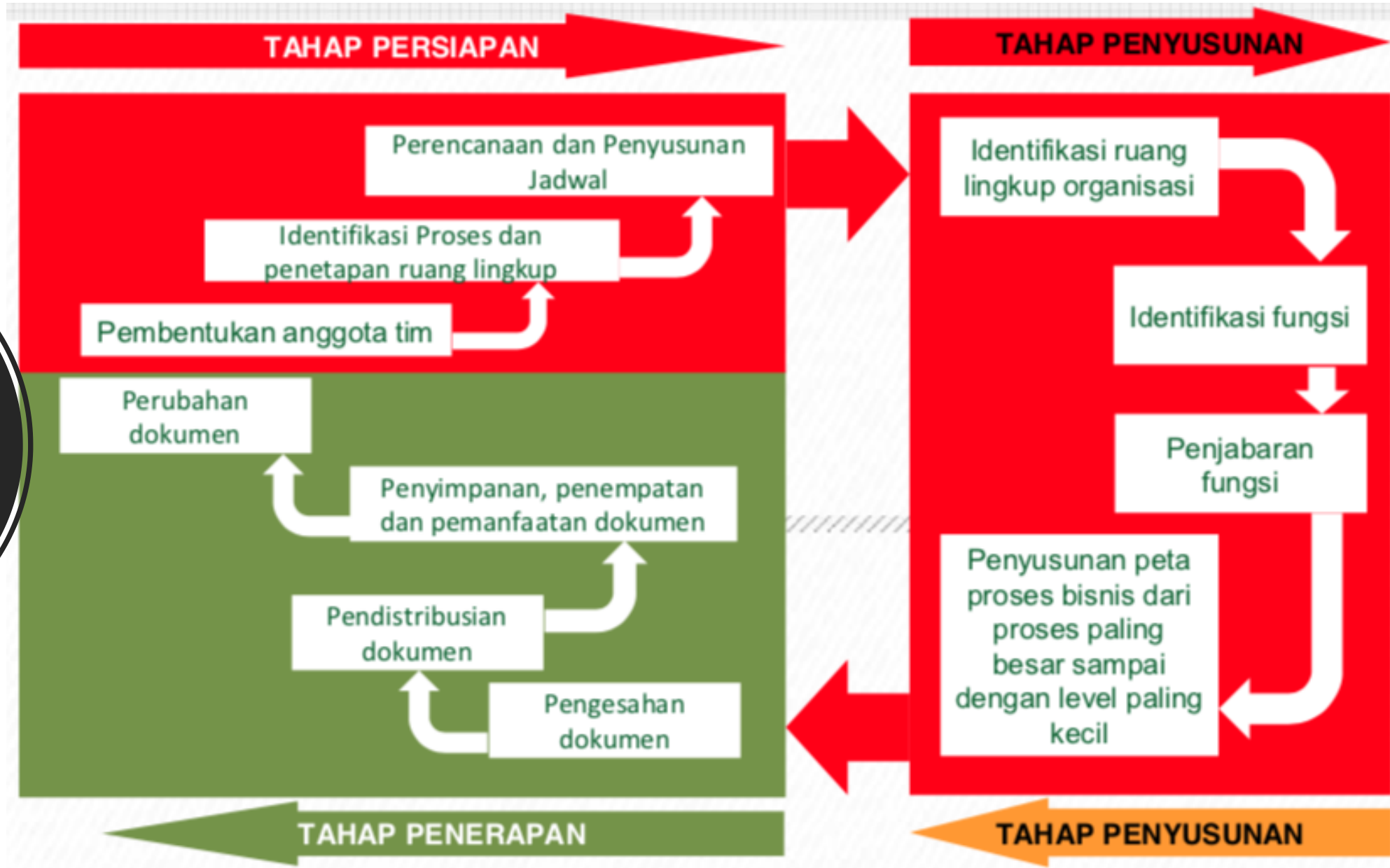


	Management	Perumusan Kebijakan HKPD	Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD)	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Management		<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profil Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profil Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profil Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profil Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profil Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit
Perumusan Kebijakan HKPD	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengaturan Pelaksanaan Mengajukan Usulan Neraca Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peraturan/Perincangan Peraturan 		Menyampaikan Lampiran Peraturan Presiden dan atau PMK terkait alokasi Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah		Menindaklanjuti Hasil	
Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengaturan Pelaksanaan Mengajukan Usulan Neraca Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peraturan/Perincangan Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Perumusan Kebijakan HKPD Meminta Finalisasi Lampiran Peraturan Presiden dan atau PMK terkait alokasi Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah 				
Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengaturan Pelaksanaan Mengajukan Usulan Neraca Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peraturan/Perincangan Peraturan 	Meminta Perumusan Kebijakan HKPD				
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengaturan Pelaksanaan Mengajukan Usulan Neraca Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peraturan/Perincangan Peraturan 	Meminta Perumusan Kebijakan HKPD		Menyampaikan Rekomendasi Penyusunan		
Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengaturan Pelaksanaan Mengajukan Usulan Neraca Dinas Direktorat Jenderal PK 	Meminta Perumusan Kebijakan HKPD				

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Ragam dan Proses Penyusunan

Tahapan
Penyusunan
Proses
Bisnis



Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

- Pengumpulan Informasi
- Pengorganisasian

PENGEMBANGAN

- Menyusun peta proses bisnis menggunakan **level**
- Menyusun peta proses bisnis menggunakan **jenis gambar**

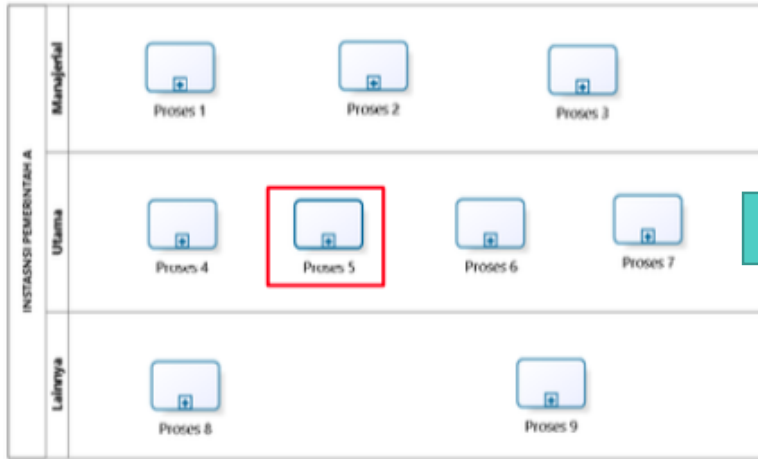
PENERAPAN / IMPLEMENTASI

- Pengesahan : oleh pimpinan instansi pemerintah dengan SK
- Pendistribusian
- Penyimpanan dan Pemanfaatan
- Perubahan,

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- Dilakukan oleh instansi yang mempunyai fungsi ketatalaksanaan;
- Paling sedikit 1 tahun sekali
- Dilaporkan ke Kemenpanrb

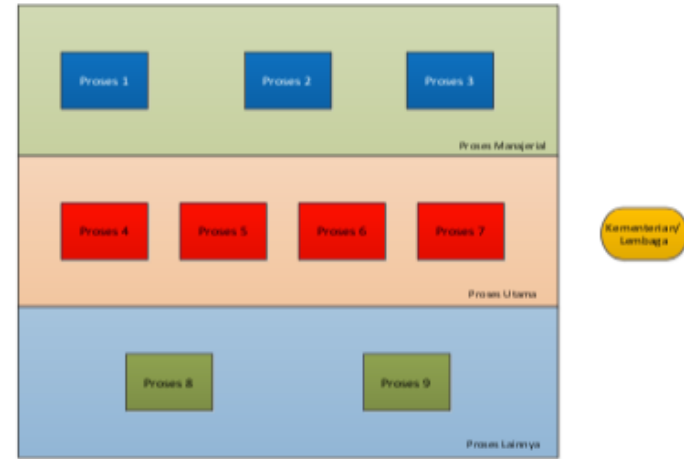
Ragam Gambar Peta Proses Bisnis



Level 0

Proses

Komentar/Lambang

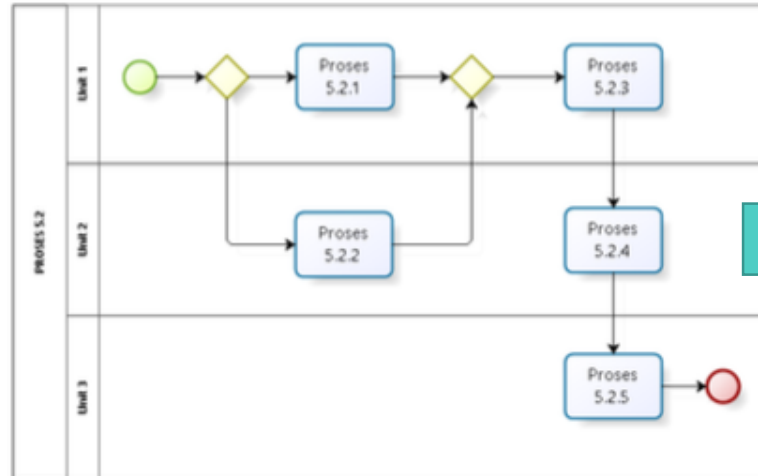


Komentar/Lambang



Level 1

Sub-Proses



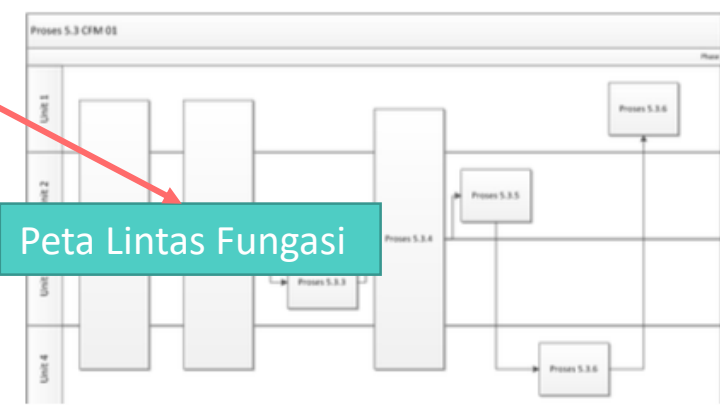
Level n

Berdasar Level

Berdasar Jenis Gambar

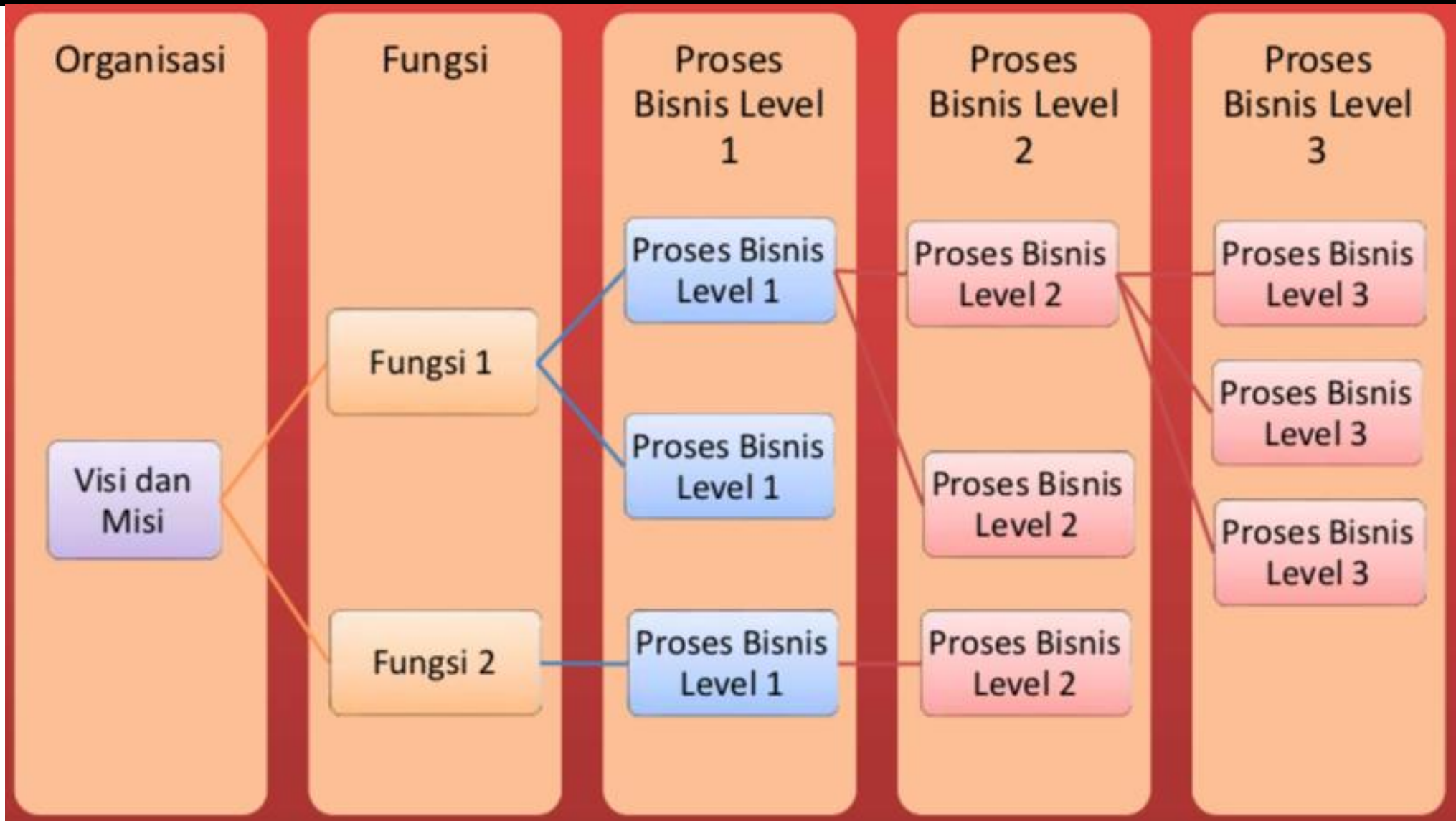


Peta Relasi

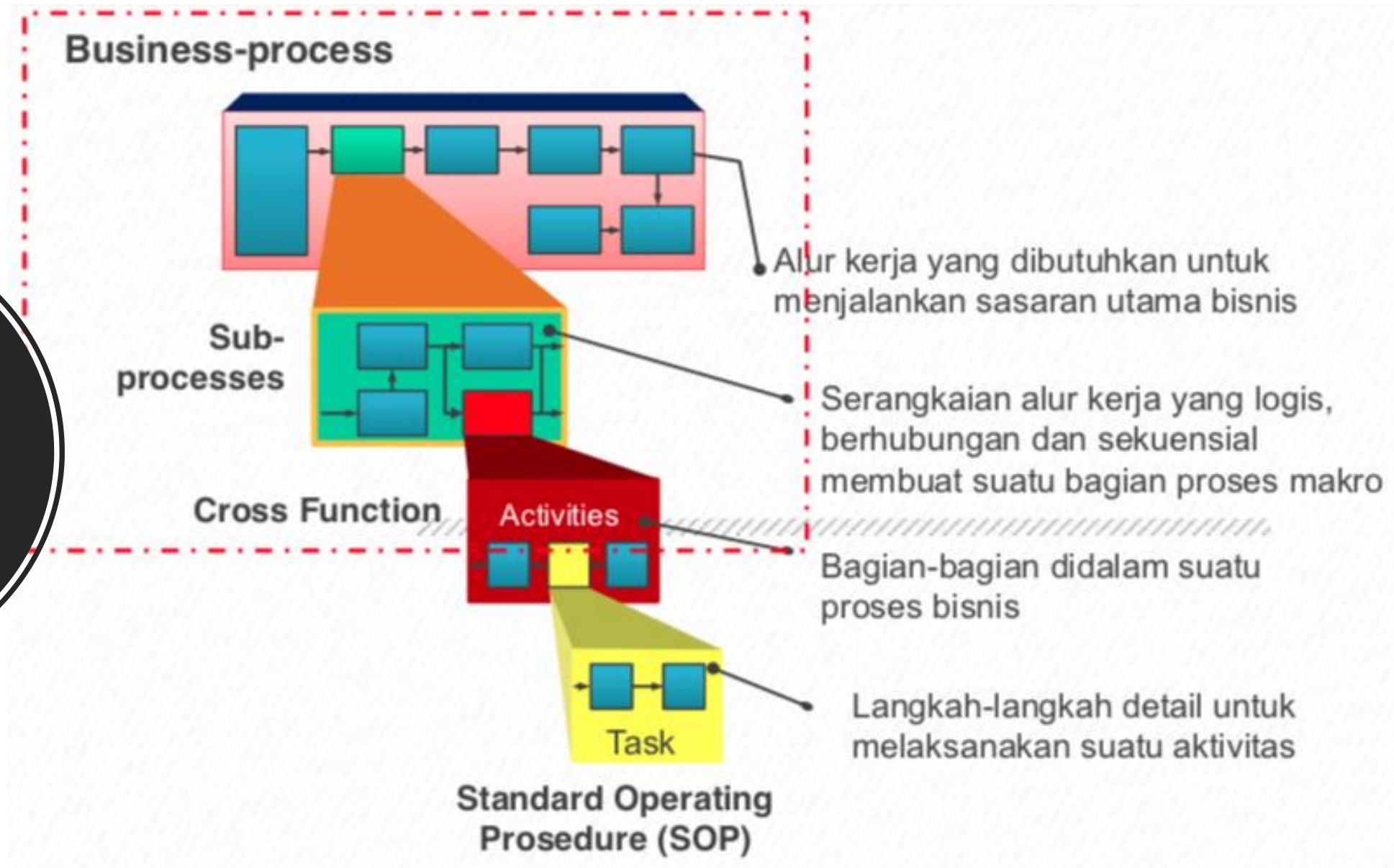


Peta Lintas Fungsi

Hierarki Proses Bisnis



Kerangka Pengembangan Proses Bisnis



Bentuk Flowchart dan Fungsinya



SIMBOL	NAMA	FUNGSI
	TERMINATOR	Permulaan/akhir program
	GARIS ALIR (FLOW LINE)	Arah aliran program
	PREPARATION	Proses inialisasi/pemberian harga awal
	PROCESS	Proses perhitungan/proses pengolahan data
	INPUT/OUTPUT DATA	Proses input/output data, parameter, informasi
	PREDEFINED PROCESS (SUB PROGRAM)	Permulaan sub program/proses menjalankan sub program
	DECISION	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	ON PAGE CONNECTOR	Penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman
	OFF PAGE CONNECTOR	Penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda

Fungsi Warna Pembeda



1. Warna dalam Background biasanya digunakan untuk membedakan Jenis Proses: PROSES UTAMA, PROSES MANAJERIAL/ PENDUKUNG, PROSES LAINNYA.
2. Warna dalam Proses, digunakan untuk membedakan key-activity;

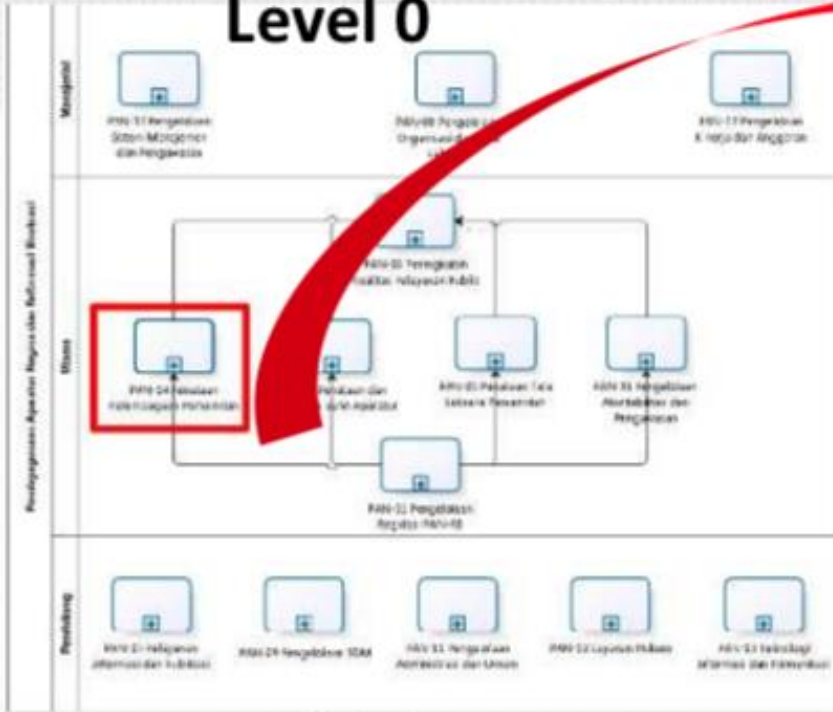
**bukan standar baku, hanya untuk memudahkan proses*

CONTOH PETA PROSES BISNIS

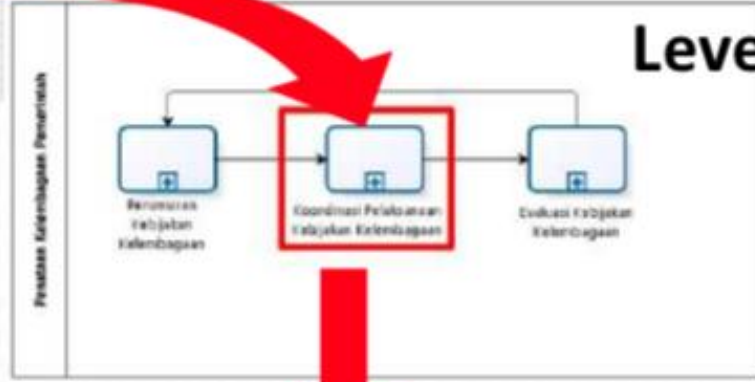
Gambar Peta Proses Bisnis berdasar Level dan Jenis Gambar

Konsep Permodelan BPMN

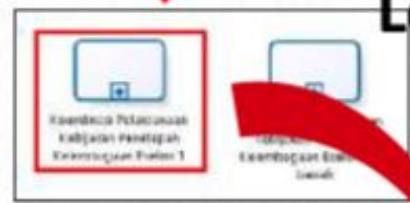
Level 0



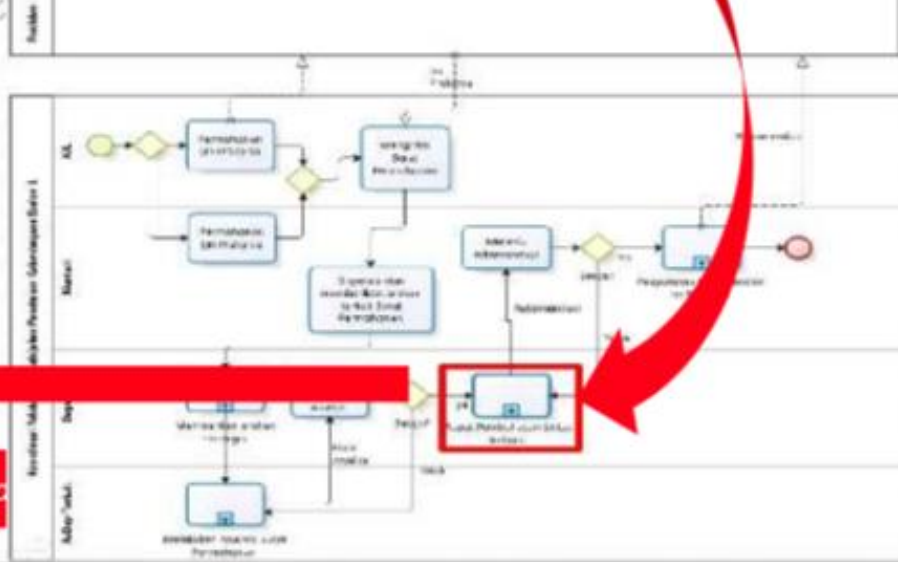
Level 1



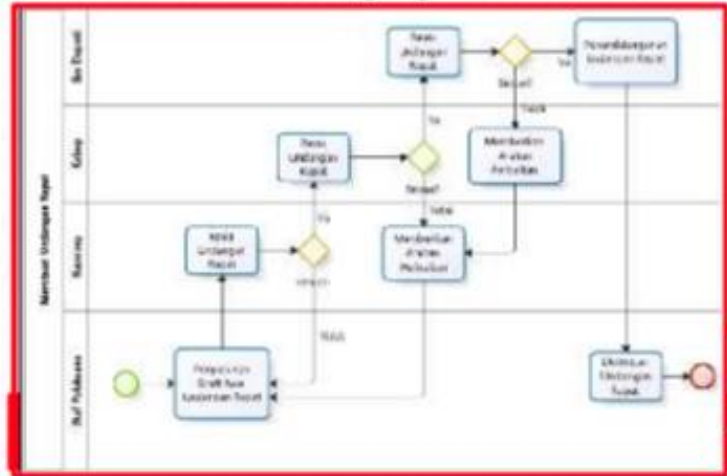
Level 2



Level 3

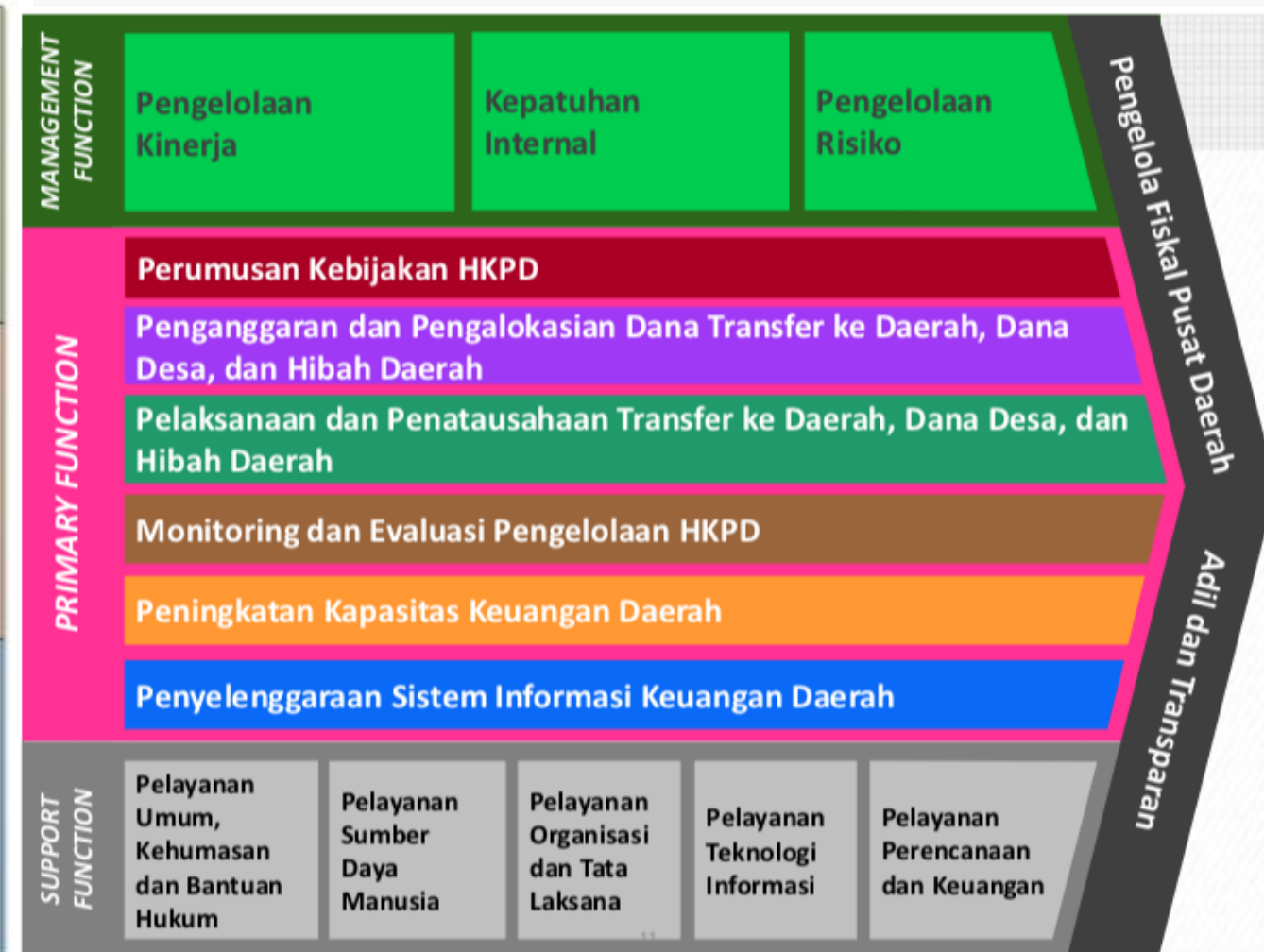
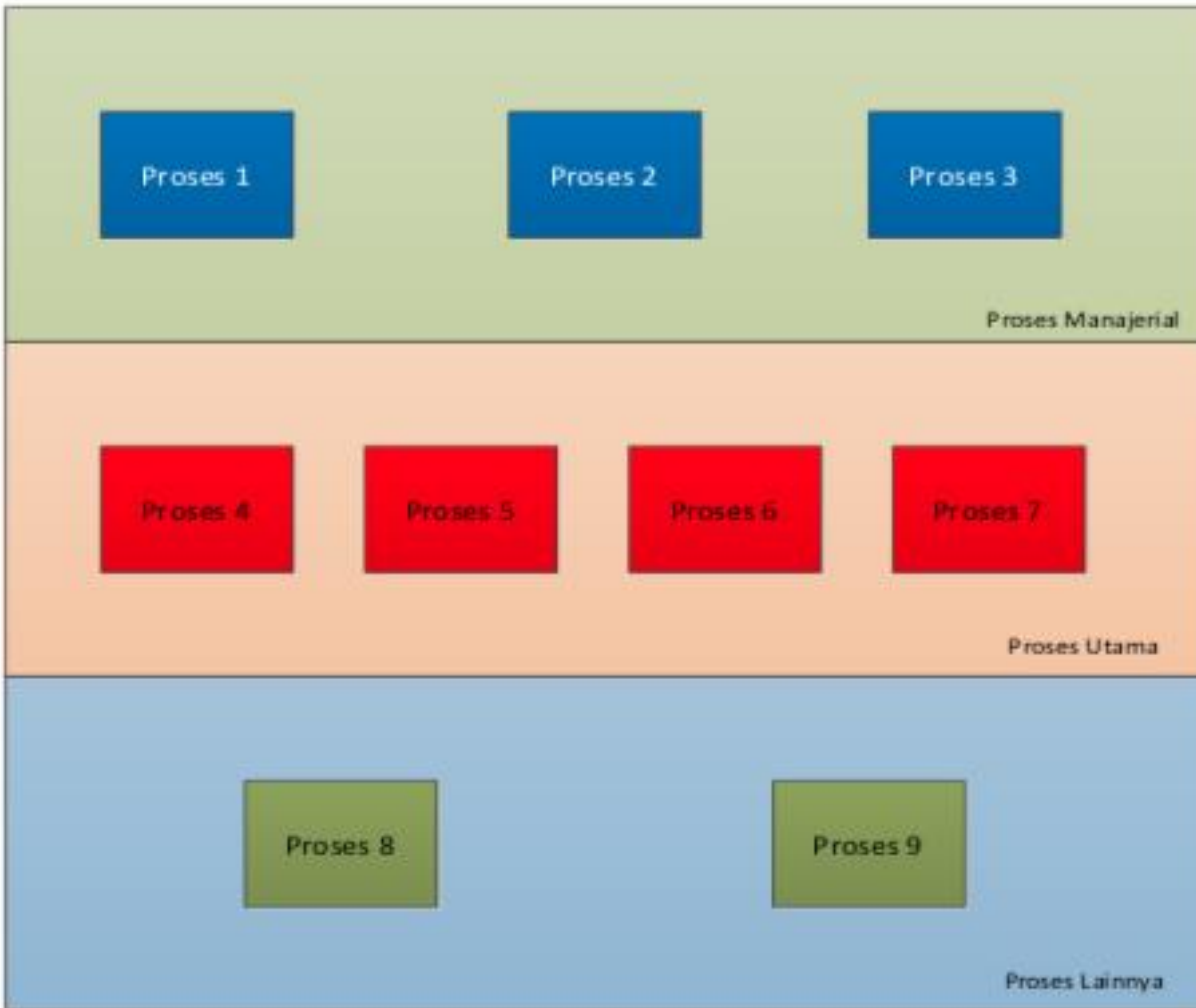


Level (n)

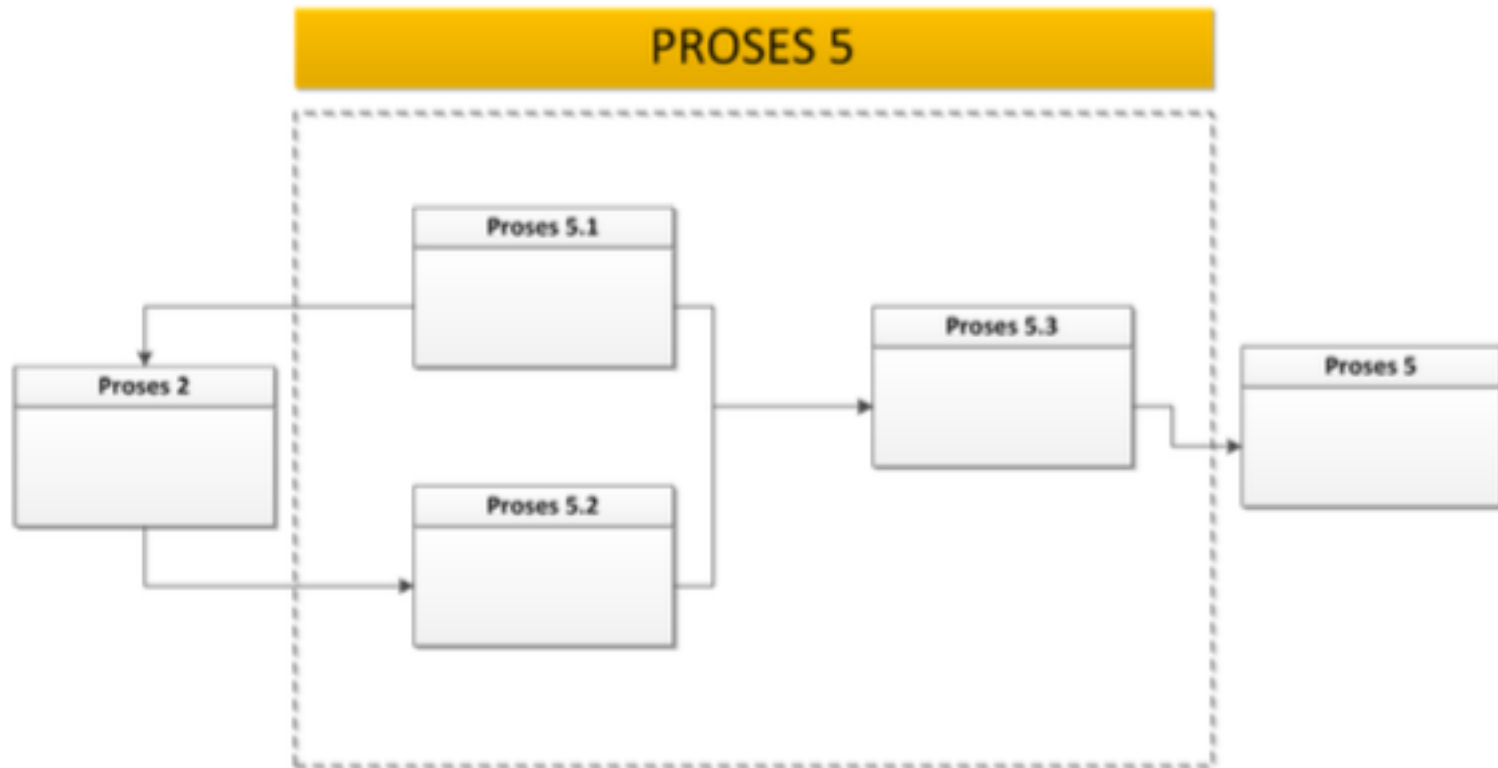
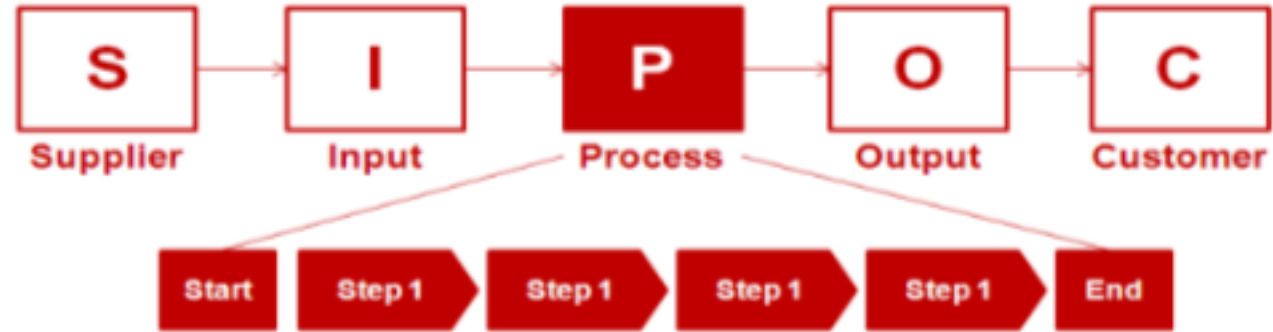


nbagaan d

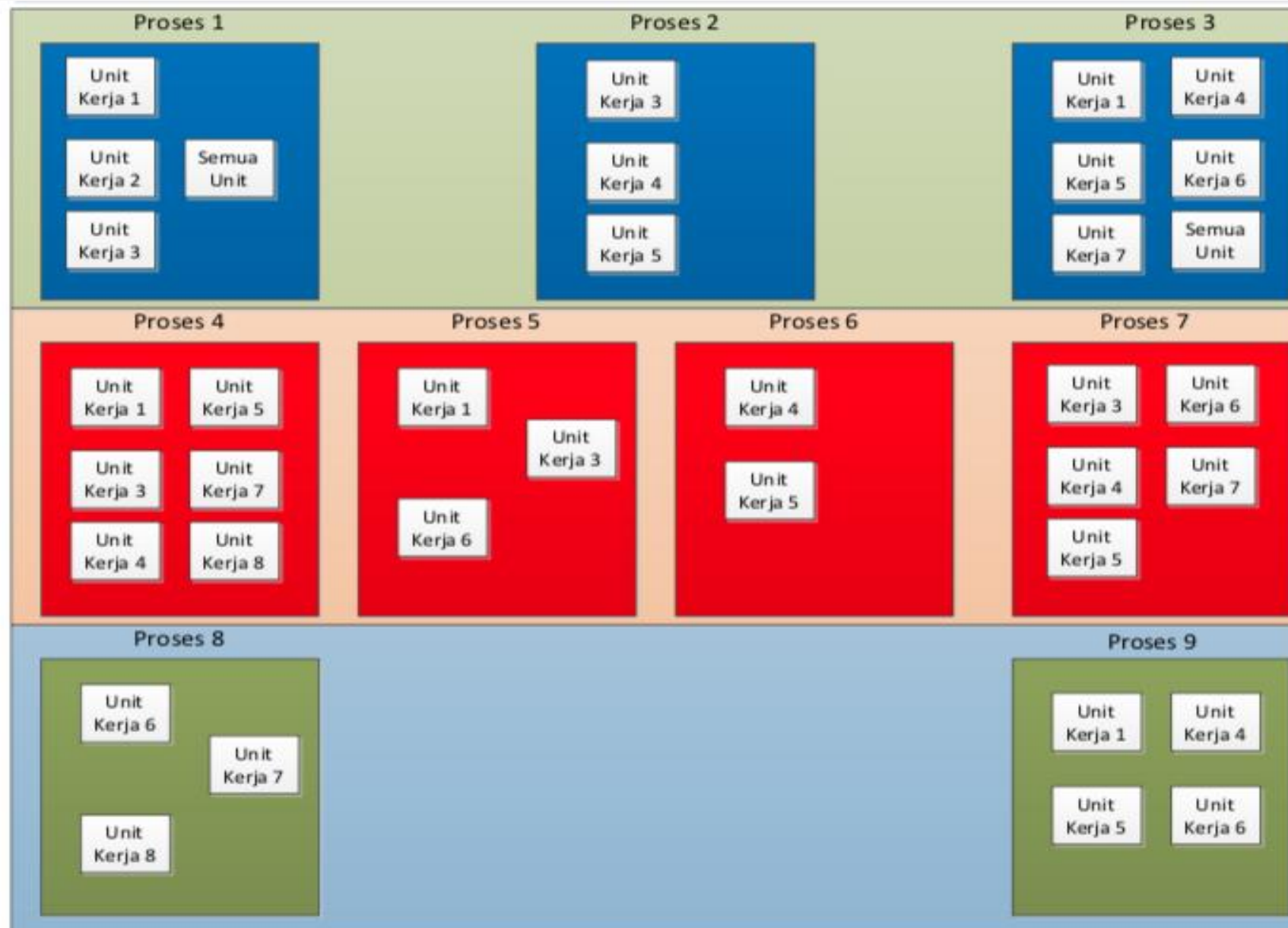
Contoh Peta Proses Bisnis (1)



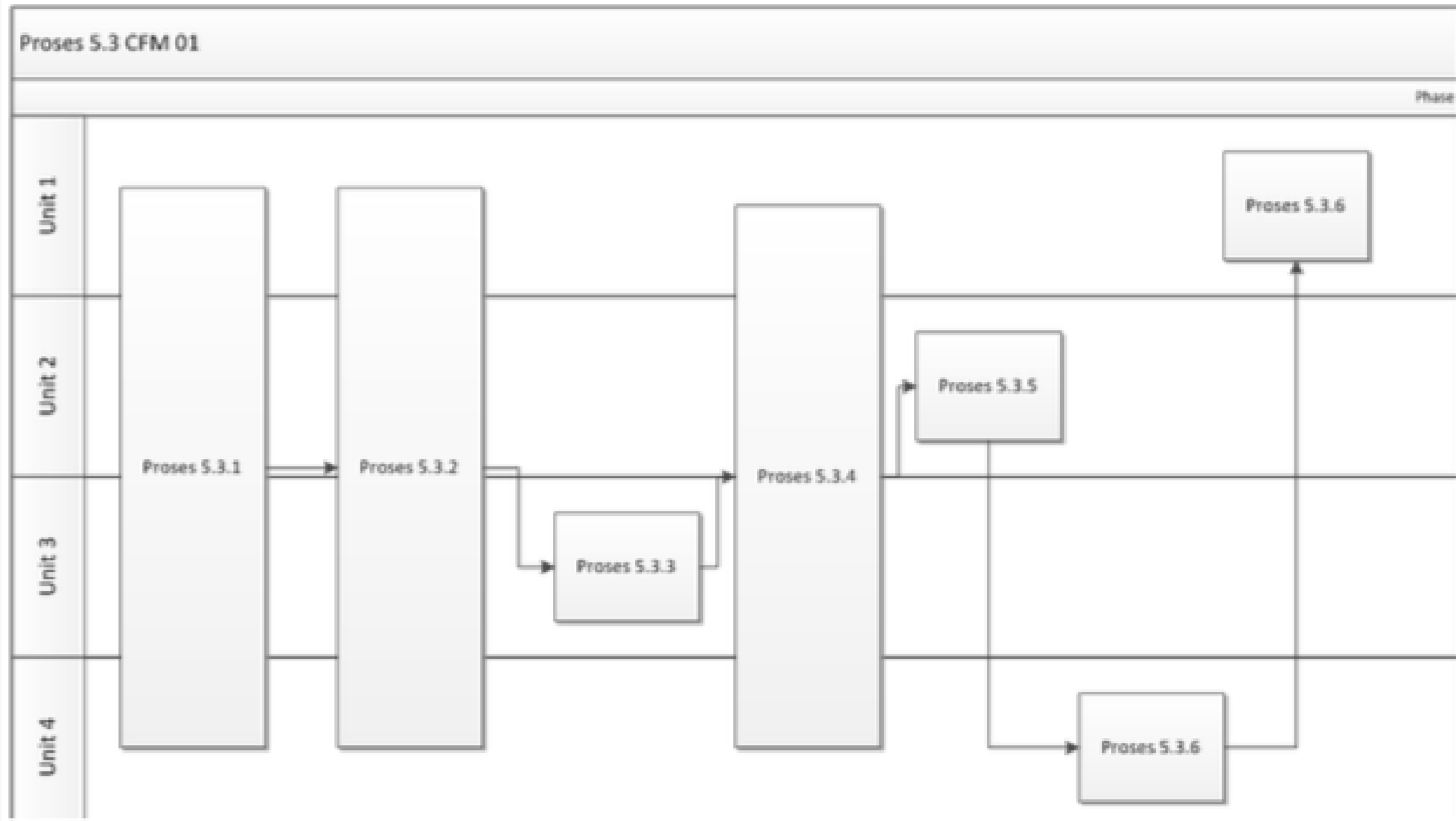
Contoh Sub-Proses (2)



Contoh Peta Relasi (3)



Contoh Peta Lintas Fungsi (4)



#Proses Bisnis Pencapaian Visi

Level 0

PEMERINTAH KOTA MALANG

MANAJERIAL

4a

TATA KELOLA PEMERINTAHAN (INTERNAL)



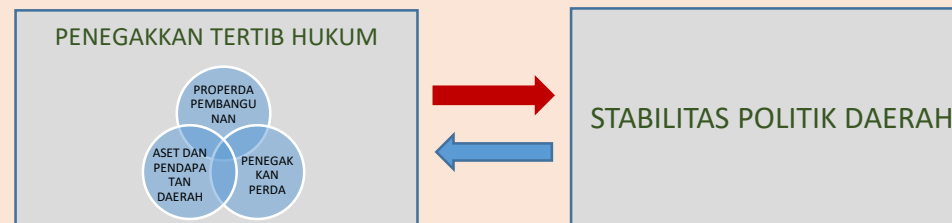
UTAMA



LAINNYA

4b

TATA KELOLA PEMERINTAHAN (EKSTERNAL)



“KOTA MALANG BERMARTABAT”
VISI

Langkah Intervensi-Misi 4

Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel



Cascading Kinerja – Misi 4

TUJUAN

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

INDIKATOR

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

SASARAN

Meningkatnya Penegakan dan Tertib Hukum

INDIKATOR

% perda yang ditegakkan

Meningkatnya Pembangunan Sistem Kelembagaan yang Efektif

INDIKATOR

Nilai SAKIP
Opini WTP
Maturitas SPIP
Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik

Meningkatnya Manajemen ASN

INDIKATOR

% ASN yang sesuai kompetensi

Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi

INDIKATOR

% SIM pemerintahan yang terintegrasi
% layanan online yang terintegrasi

OPD LEADING

SATPOL PP

BAGIAN HUKUM

BAGIAN SETDA

INSPEKTORAT

BARENLITBANG

BPKAD

DPMPTSP

BPPD

DINAS PERPUS DAN ARSIP

SEMUA OPD

BKD

BAGIAN ORGANISASI

SEMUA OPD

DINAS KOMINFO

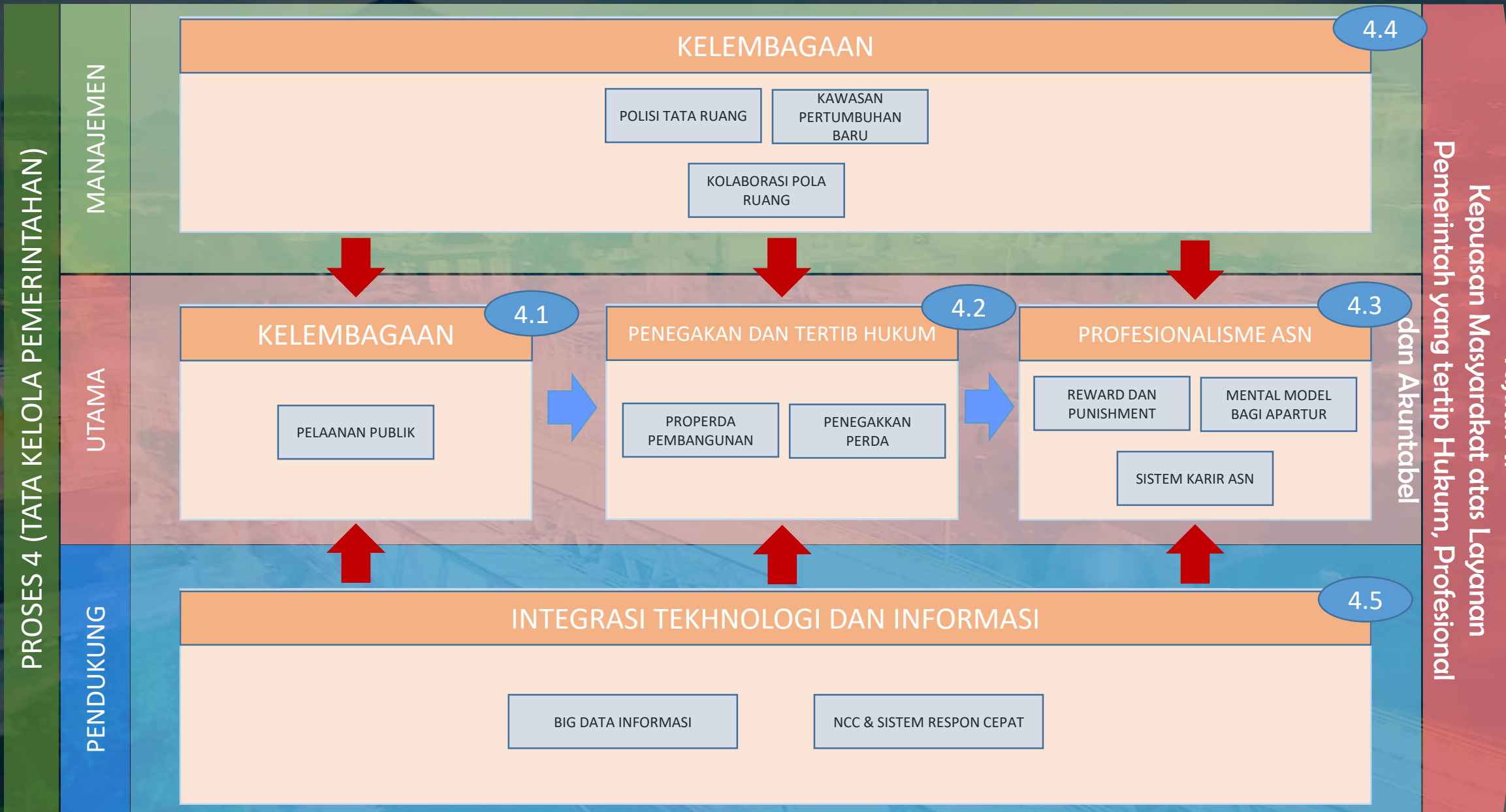
DPMPTSP

DISPENDUKCAPIL

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA

KECAMATAN

Proses Bisnis Pencapaian – Misi 4



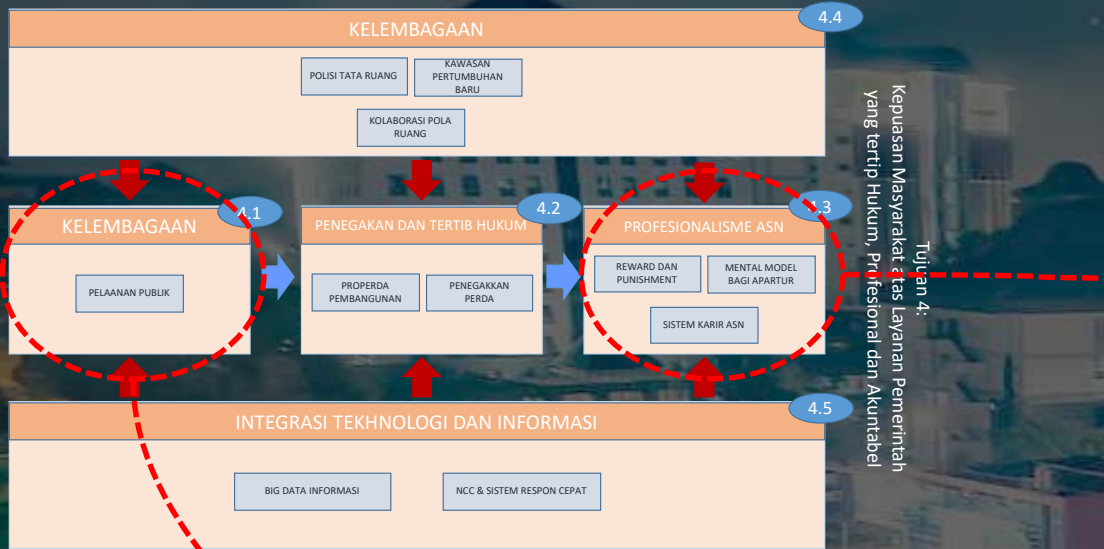
Breakdown Proses Bisnis – Misi 4

PROSES 4 (TATA KELOLA PEMERINTAHAN)

MANAJEMEN

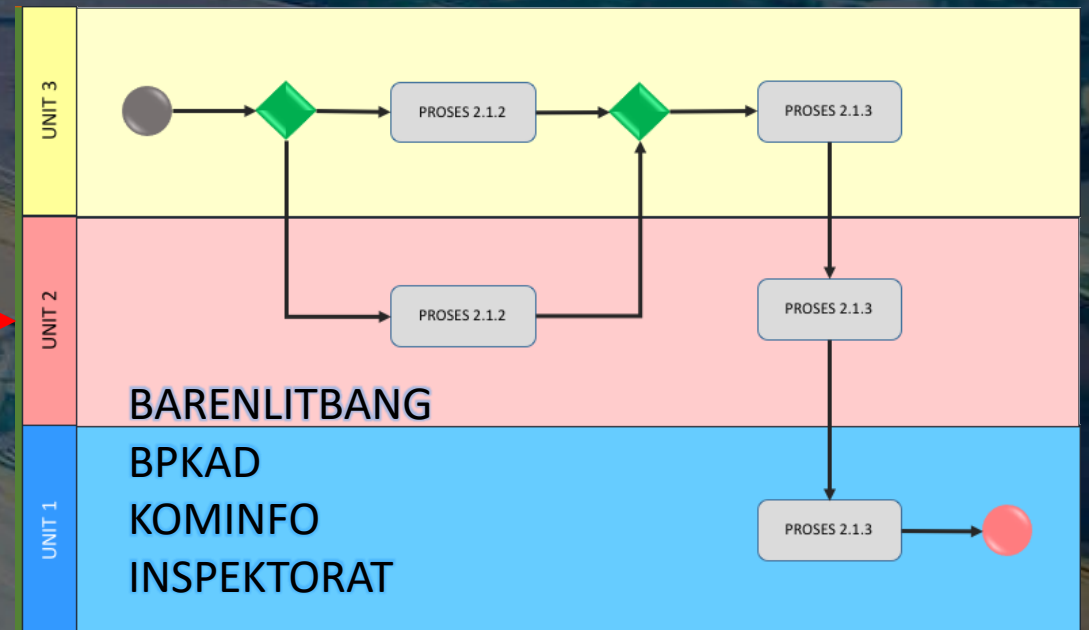
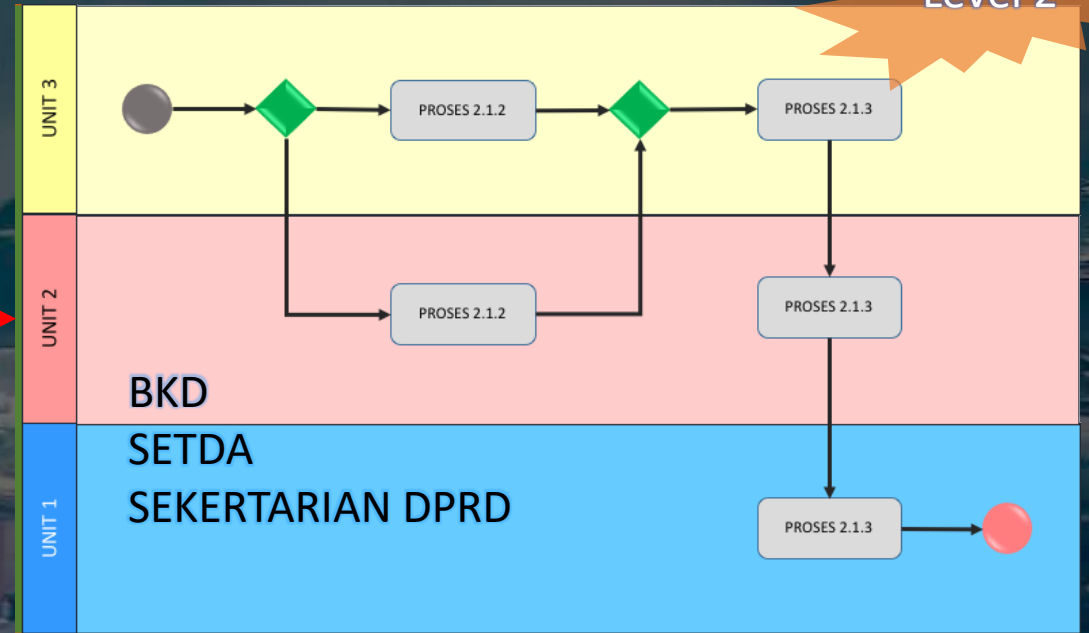
UTAMA

PENDUKUNG



Tujuan 4: Kejuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang tertip Hukun, Profesional dan Akuntabel

Level 2



Menurunkan Proses Bisnis di Level Sasaran Strategis menjadi Proses Bisnis di Level Program dan Kegiatan, oleh tiap OPD yang terlibat

KERTAS KERJA-PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Praktik menyusun proses bisnis dari awal sampai akhir

Kertas Kerja Praktik Penyusunan Peta Proses Bisnis

KERTAS KERJA

A

- A-1 : Value Proposition
- A-2 : Government Model Canvas
- A-3 : Matriks Arsitektur Bisnis dan data
- A-4 : Matriks Silang Hubungan Lintas Fungsi

KERTAS KERJA

B

- B-1 : Gambar Peta Proses (level 0)
- B-2 : Gambar Peta Sub-Proses (level 1)
- B-3 : Gambar Peta Relasi
- B-4 : Gambar Peta Lintas Fungsi (level-n)

Catatan:

1. Proses lainnya masih kosong
2. Peta Sub Proses belum menjelaskan secara detail proses input dan output
3. Contoh kode SDA.08 Peta sub proses berjumlah 8 program prioritas , sedangkan Dokumen RPJMD total program prioritas berjumlah 10 Program prioritas. (note: mengalami perubahan prioritas)
4. Sub proses diturunkan langsung lintas fungsi, apakah sebaiknya tidak diturunkan ke level-n.



Lanjutan

5. Proses pada lintas fungsi masih banyak yang belum jelas pengampu atau pelaksananya.
6. Peta Lintas Fungsi pada alur harus menjelaskan aktivitas bukan pengampu aktivitas.
7. Penempatan notasi masih belum pada tempatnya (misal untuk Decision, siapa pengambil keputusannya).
8. Pada peta lintas fungsi (contoh SDA.08.06 perencanaan pembangunan daerah) hanya menggambarkan lintas fungsi RKPD.
9. Beberapa alur masih banyak yang belum sesuai dengan kaidah, tidak menunjukkan flow proses, contohnya arah panah yang mati/tidak mengalir (SDA.01.01.CFM.01 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)).





Proses bisnis adalah
sebuah *Tool*
~~*Goal*~~...!!

THANKS.....,

IMPLEMENTASI ANALISIS PROSES BISNIS DALAM PERUMUSAN DAN KEGIATAN

1. Upaya perbaikan layanan dari sisi penganggaran dapat dilakukan dengan:
 - a. Menambah Anggaran Layanan Publik
 - b. Mengurangi Anggaran Belanja Tidak Langsung
 - c. Menghemat Anggaran
2. Dibawah ini bukan termasuk dalam pendekatan perencanaan yang berorientasi pada substantive adalah
 - a. Tematik-Holistik
 - b. Partisipatif
 - c. Spasial
3. Ciri dari sebuah perencanaan terintegrasi adalah:
 - a. Disusun dari bawah keatas
 - b. Lengkap meliputi proses hulu dan hilir
 - c. Di intervensi bersama-sama melibatkan banyak urusan
4. Berikut ini bukan bagian dari ciri *logical framework* (logframe) yang baik:
 - a. Cascading
 - b. Alignment
 - c. Interaktif
5. Urutan yang tidak tepat:
 - a. Proses Bisnis → Logframe → Desain Organisasi
 - b. Logframe → Proses Bisnis → Desain Organisasi
 - c. Logframe → Desain Organisasi → Proses Bisnis
6. Yang dimaksud dengan Proses Bisnis:
 - a. Kumpulan tupoksi yang terstruktur
 - b. Kumpulan aktivitas yang terstruktur
 - c. Kumpulan tahapan produksi
7. Yang bukan bagian dari prinsip peta proses bisnis:
 - a. Definitif
 - b. Sederhana-representatif
 - c. Transparan
8. Yang merupakan kaidah dasar proses bisnis:
 - a. Utama – Pendukung – Manajemen
 - b. Rencana – Desain – Pelaksanaan
 - c. Persiapan – Pelaksanaan – Evaluasi
9. Yang dimaksud *Value Proposition*:
 - a. Bertemuanya Input dan output
 - b. Bertemuanya keinginan pelanggan dan penyediaan layanan
 - c. Bertemuanya kapasitas anggaran dan perencanaan
10. Urutan pengembangan proses bisnis:
 - a. Proses Bisnis → sub-proses → lintas fungsi → SOP
 - b. Proses Bisnis → lintas fungsi → sub-proses → SOP
 - c. Proses Bisnis → sub-proses → SOP → lintas fungsi